



PEMERINTAH
KABUPATEN JOMBANG

bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

JOMBANG
SANTRI

2024



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JOMBANG



Jl. Presiden KH. Abdurahman Wahid No. 151 Jombang



Telp. 0321. 873333 Fax. 0321. 851733



dpmptsp.jombangkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahNya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang Tahun 2024, ini dapat dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang Tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang dalam mencapai misi dan tujuan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance). Laporan ini menggambarkan tingkat pencapaian kinerja, keberhasilan dan/atau kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang ini disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja instansi tahun 2024 dengan harapan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pengukuran dan evaluasi kinerja instansi selama tahun 2024, yang memuat data kinerja yang akuntabel, meliputi uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Disamping itu juga dilaporkan akuntabilitas keuangan berupa data alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai salah satu landasan yuridis formal dan instrumen untuk mengukur serta mengevaluasi pertanggungjawaban kinerja organisasi dan pelaksanaan tugas aparatur pemerintah pada berbagai level instansi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kami menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Oleh sebab itu saran dan kritik yang membangun akan senantiasa kami terima untuk perbaikan laporan di masa yang akan datang.

Semoga LKjIP yang kami susun ini dapat memberikan gambaran terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang selama Tahun 2024 dan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi guna penyusunan perencanaan kinerja beserta target kinerja yang lebih baik di tahun berikutnya.

Jombang, Januari 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JOMBANG**



Dra. WOR WINDARI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19731204 199202 2 001

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	2
1.3 Fungsi Strategis Perangkat Daerah	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Perencanaan Strategis	11
2.2 Perjanjian Kinerja (PK)	12
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	22
3.1.1 Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini	23
3.1.2 Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Dua (2) Tahun Terakhir	28
3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah	39
3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Realisasi Kinerja di Level di Level Nasional/Internasional.....	43
3.1.5 Analisis Atas Realisasi Kinerja.....	48
3.2 Realisasi Anggaran	53
3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran.....	51
3.2.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	56
3.2.2.1 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan/ Anggaran.....	56
3.2.2.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia	61
3.2.2.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sarana dan Prasarana.....	64

3.3 Upaya Perbaikan Kinerja	69
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	76
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024	
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2024	
Lampiran 3. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2024	
Lampiran 4. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi 2024	
Lampiran 5. Pengukuran Kinerja 2024	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.2.1 Data SDM Menurut Golongan	5
Tabel 1.2.2 Data SDM Menurut Jenis Kelamin	5
Tabel 1.2.3 Data SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan	5
Tabel 1.3.1 Identifikasi Pelayanan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	9
Tabel 2.2.1 Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2024	13
Tabel 2.2.1.1 Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada Perubahan Renja PD Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang.....	15
Tabel 2.3.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024	19
Tabel 3.1 Skala Capaian Kinerja	22
Tabel 3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 ...	23
Tabel 3.1.2 Nilia Evaluasi AKIP Tahun 2024	27
Tabel 3.1.3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan 2 (dua) Tahun Terakhir.....	29
Tabel 3.1.4 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah	39
Tabel 3.1.5 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional/Internasional	43
Tabel 3.1.6 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja di Level Kabupaten, Provinsi dan Nasional	45
Tabel 3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran.....	53
Tabel 3.2.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan/Anggaran.....	57
Tabel 3.2.3 Daftar Kebutuhan Pegawai.....	61
Tabel 3.2.4 Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah tahun 2024	64
Tabel 3.2.5 Efisiensi Sarana dan Prasarana Tahun 2024	67

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintahan yang akuntabel dan terukur serta pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Atas dasar tekad dan semangat untuk mewujudkan akuntabel dan good governance itu maka beban tugas dan tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang sebagai perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dirasakan semakin berat, karena aparatur daerah dituntut untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dan dapat mewujudkan pemerintahan yang mampu mempertanggungjawabkan hasil / manfaat kepada masyarakat. Dalam rangka pemenuhan atas tuntutan itu, maka diperlukan pengembangan dan penetapan sistem serta prosedur kerja yang cepat, tepat, transparan dan nyata serta dapat dipertanggung jawabkan sehingga penyelenggaraan tugas-tugas pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang harus bisa berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna serta penyelenggaraan pelayanan perizinan dapat berlangsung dengan prinsip-prinsip pelayanan prima.

Selanjutnya salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas, karena merupakan salah satu wujud komitmen organisasi penyelenggara negara dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan pada setiap akhir tahun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kinerja Instansi Pemerintah maka sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi, agar instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang Tahun 2024 pada dasarnya adalah bentuk pertanggungjawaban atas kewenangan yang disertai dengan berbagai sumberdaya yang dipergunakan untuk mencapai visi dan misi organisasi serta berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance.

1.2 GAMBARAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN JOMBANG

Dinas Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang. Dan sebagai instansi yang bertugas mengelola urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal di Kabupaten Jombang yang tertuang dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 92 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang. Serta instansi penyelenggara dan penyediaan fasilitas gerai pelayanan pada Mal Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jombang.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Jombang di bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan satu pintu;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan satu pintu;

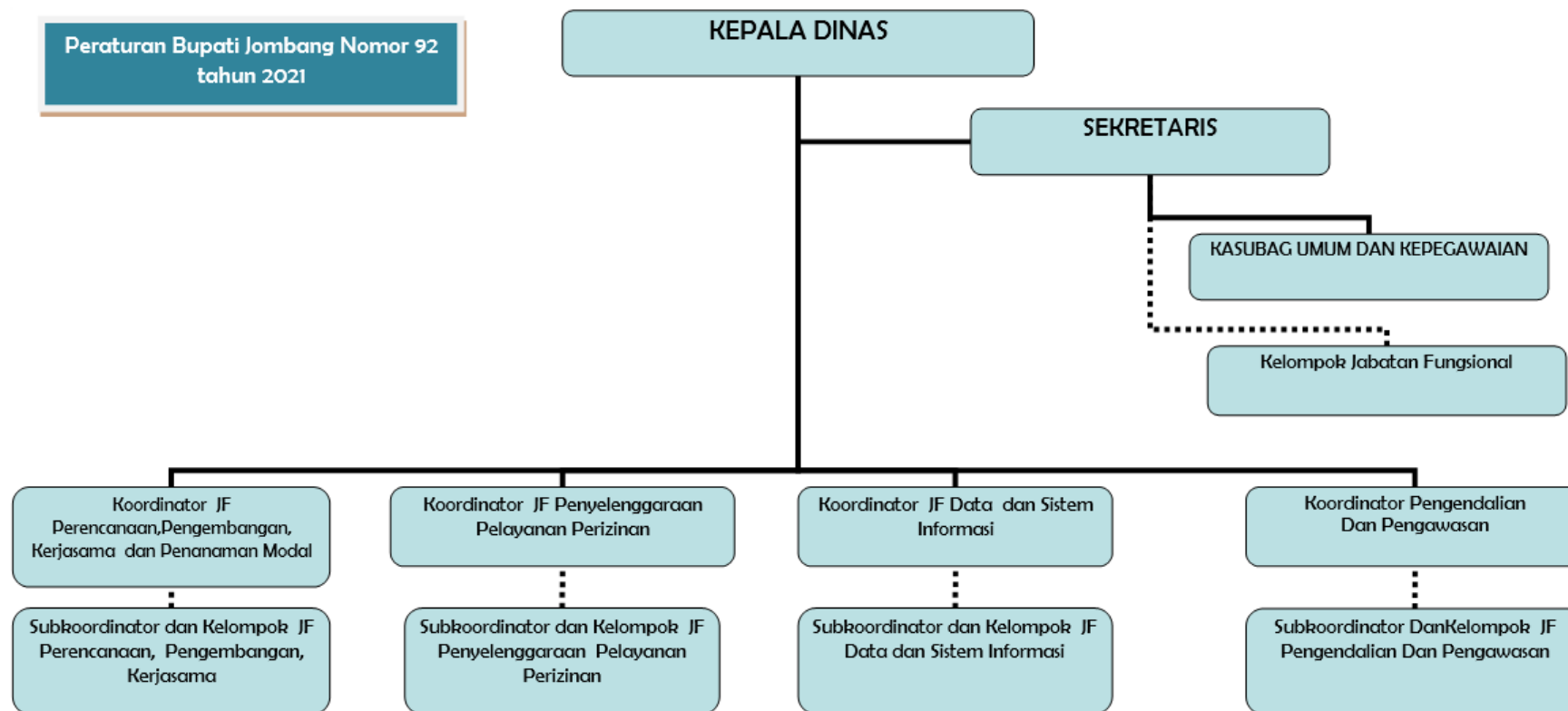
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan satu pintu;
- Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, Berkoordinasi dengan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Koordinator Jabatan Fungsional Bidang Perencanaan, Pengembangan, Kerjasama, dan Promosi Penanaman Modal, berkoordinasi dengan:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Perencanaan, Pengembangan, Kerjasama, dan Promosi Penanaman Modal;
4. Koordinator Jabatan Fungsional Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, berkoordinasi dengan:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.
5. Koordinator Jabatan Fungsional Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi, berkoordinasi dengan:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi;
6. Koordinator Jabatan Fungsional Bidang Pengendalian dan Pengawasan, berkoordinasi dengan:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Pengendalian dan Pengawasan;

Bagan Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang memiliki 43 (Empat Puluh Tiga) Sumber Daya Manusia, meliputi 30 (Tiga Puluh) orang PNS, 2 (dua) orang PPPK dan 11 (Sebelas) orang tenaga kontrak (Non ASN). Susunan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang adalah sesuai tabel berikut:

Tabel 1.2.1
Data Sumber Daya Manusia
Menurut Golongan

GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI
I	-
II	4 orang
III	20 orang
IV	6 orang
PPPK	2 orang
Non ASN	11 orang
Jumlah	43 orang

Tabel 1.2.2
Data Sumber Daya Manusia
Menurut Jenis Kelamin

JENIS KELAMIN	PNS	PPPK	PEGAWAI HONORER	JUMLAH
Laki-Laki	17	0	7	25
Perempuan	13	2	4	18
Jumlah	30	2	13	43

Tabel 1.2.3
Data Sumber Daya Manusia
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS	PPPK	PEGAWAI HONORER
1	S2	9	-	-
2	S1	16	1	6
3	D1-D3	2	1	-
4	SLTA	3	-	5
5	SLTP	-	-	-
6	SD	-	-	-
	JUMLAH	30	2	11

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jombang, memiliki peta proses bisnis utama yang merupakan penjelasan dari proses bisnis dari tiap bidang pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Penyelenggaraan pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP merupakan salah satu kegiatan pelayanan publik yang meliputi semua jenis perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Bupati. Program peningkatan mutu pelayanan perizinan merupakan program yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Program ini memiliki keterkaitan proses dengan Pencabutan Izin, Rekomendasi Teknis, Regulasi Izin, dan Permohonan Izin. Hal tersebut dapat mempengaruhi program peningkatan mutu pelayanan perizinan. Rekomendasi teknis merupakan dasar pertimbangan penerbitan izin sehingga kualitas mutu pelayanan rekomendasi teknis akan mempengaruhi secara langsung Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan. Dalam rangka peningkatan realisasi investasi penanaman modal, Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan memiliki keterkaitan proses dengan Program Pengendalian Dan Pengawasan Penanaman Modal dan Perizinan. Output perizinan pelaku usaha ditindak lanjuti oleh kegiatan pengendalian penanaman modal dalam bentuk laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) secara periodik triwulan. Diharapkan dari 2 (dua) program yang berkesinambungan ini dapat meningkatkan realisasi investasi penanaman modal. Dalam rangka pemenuhan data penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan prima, Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan memiliki keterkaitan dengan Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi. Data perizinan yang terbit dapat menjadi data utama penanaman modal. Selain itu, penyelenggaraan pelayanan perizinan yang prima dapat juga memanfaatkan teknologi sistem informasi yang dikembangkan dalam Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi. Program ini diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan pelayanan prima berbasis teknologi system informasi dan keakuratan data penanaman modal. Program penunjang dalam Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan terkait dukungan perlengkapan, sumber daya manusia dan anggaran. Hal itu termasuk dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur dan Program Perencanaan Strategis Pelaporan Kinerja yang diampu oleh Sekretariat. Dukungan tersebut sangatlah diperlukan untuk implementasi kegiatan

penyelenggaraan pelayanan perizinan.

Selain melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Penanaman Modal dan PTSP juga sebagai instansi penyelenggara dan penyediaan fasilitas gerai pelayanan pada Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jombang.

Saat ini terdapat 12 (dua belas) Gerai Layanan di pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Jombang yang terdiri dari :

1. Kementerian Agama Kabupaten Jombang
2. ATR/BPN
3. Dinas PUPR
4. BPJS Kesehatan
5. BPJS Ketenagakerjaan
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8. KPP Pratama
9. Dinas Penanaman Modal dan PTSP
10. Dinas Kesehatan
11. Taspen
12. Pengadilan Agama
13. Pengadilan Negeri
14. Help Desk

Gerai layanan ini masih akan bertambah sesuai dengan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Jombang dan akan disiapkan sebanyak 20 gerai layanan publik.

Berikut penjelasan tentang peran serta dan manfaat dari pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) dari sisi peningkatan nilai investasi dan kemudahan pelayanan perizinan:

Peran serta Mal Pelayanan Publik (MPP) dalam Peningkatan Nilai Investasi

- a. Peningkatan Efisiensi: MPP dapat mempercepat proses pelayanan perizinan dan pengelolaan dokumen, sehingga investor dapat lebih cepat memulai usahanya.

- b. Pengurangan Biaya: Dengan adanya MPP, investor tidak perlu lagi mengunjungi beberapa kantor pemerintah untuk mengurus perizinan, sehingga dapat menghemat biaya dan waktu.
- c. Peningkatan Transparansi: MPP dapat memperbarui informasi tentang proses pelayanan perizinan dan pengurusan dokumen, sehingga investor dapat lebih mudah memahami proses dan persyaratan yang diperlukan.

Dengan demikian, MPP dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan nilai investasi dan kemudahan pelayanan perizinan, sehingga dapat meningkatkan kemudahan berusaha dan peningkatan nilai investasi.

1.3 FUNGSI STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN JOMBANG

Aspek-aspek strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi, permasalahan dan atau arah kebijakan dan program Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 yaitu:

- Peningkatan Realisasi Investasi
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Identifikasi permasalahan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan tugas, pokok dan fungsi meliputi :

1. Masalah jaminan kenyamanan dalam berinvestasi, hambatan ini lebih disebabkan oleh karena belum terlaksananya secara maksimal SOP dalam proses pelayanan perizinan dan kurang memadainya sarana dan prasarana untuk mendukung proses pelayanan perizinan dan penanaman modal.
2. Masih kurangnya aktivitas promosi investasi yang diikuti oleh Perangkat Daerah, sehingga potensi investasi daerah kurang terekspose.
3. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi unggulan daerah (pengolahan hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan industri pengolahan) sebagai produk yang berdaya saing nasional maupun internasional.

4. Sistem regulasi yang mengatur tentang kebijakan, fasilitas dan insentif bagi penanaman modal yang kurang menarik sehingga menyebabkan minat untuk berinvestasi semakin berkurang.
5. Masih kurangnya pemahaman para pelaku usaha terhadap penyusunan LKPM.
6. Belum optimalnya sistem penunjang Teknologi informasi untuk percepatan pelayanan perizinan dan penanaman modal.
7. Belum optimalnya koordinasi dengan SKPD Teknis sehingga proses perizinan melebihi SOP yang ditetapkan.
8. Belum luasnya cakupan informasi potensi investasi di Kabupaten Jombang sehingga calon investor kurang mendapatkan informasi mengenai potensi unggulan daerah serta peta potensi investasi di Kabupaten Jombang

Tabel 1.3.1
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya nilai realisasi investasi	Kurangnya kenyamanan dalam berinvestasi	Belum adanya penerapan regulasi terkait penanaman modal
		Promosi investasi belum optimal	Kegiatan promosi investasi tidak bisa dilaksanakan akibat imbas apndemi
			Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi unggulan daerah
			Masih belum luasnya cakupan investasi yang ada di Kabupaten Jombang
			Masih kurangnya pengetahuan pelaku usaha terkait pelaporan LKPM
2	Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat belum optimal	Masih ada anggapan pengurusan izin sulit	Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui kemudahan mengurus izin secara online
		Belum optimalnya sistem teknologi informasi	Kurang optimalnya sistem penunjang teknologi informasi untuk pelayanan perizinan dan non perizinan
			Belum optimalnya koordinasi lintas sektor

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 tidak memuat Visi dan Misi Pembangunan. Hal ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor. 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, karena periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 tidak dijabarkan dari Visi Misi Kepala Daerah terpilih, namun didasarkan pada Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan Sasaran Pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang tahun 2005-2025.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada tujuan RPD ke 1 dan 4, yaitu:

Tujuan RPD 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik

Tujuan RPD 4 : Meningkatkan Daya Saing dan Pemerataan Ekonomi melalui Pemantapan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan yang Mendorong Pengembangan Agrobisnis dan Sektor Unggul Lainnya.

Selain tujuan, dirumuskan Sasaran Perangkat Daerah dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Realisasi Investasi

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator : - Nilai Realisasi Investasi

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator : - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

- Indeks Pelayanan Publik (IPP)

- Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik

3. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator : - Nilai Evaluasi AKIP PD

Strategi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 dapat ditentukan melalui alternatif-alternatif strategi yang dianalisis dengan menggunakan metode analisis SWOT yaitu dengan menelaah dan mengidentifikasi faktor internal (Aspek Kekuatan dan Aspek Kelemahan) dan Faktor Eksternal (Aspek Tantangan dan Aspek Ancaman). Berikut merupakan identifikasi dari faktor internal dan faktor eksternal:

a. Kekuatan (Strenght)

- Tersedianya sumberdaya manusia yang mendukung dan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan
- Model manajemen birokrasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang terstruktur dan sistematis
- Jaringan kerja dan stakeholder berjalan dengan baik
- Tersedianya SOP, SP serta ISO dalam mendukung pelayanan perizinan dan penanaman modal.
- Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang.
- Tersedianya teknologi informasi untuk pelayanan perizinan berusaha (OSS-RBA) dan pelayanan perizinan non berusaha (Sirindunona).
- Adanya kebijakan dan dukungan dari pimpinan

b. Kelemahan (Weakness)

- Terbatasnya sarana dan prasarana untuk percepatan pelayanan perizinan dan penanaman modal.

- Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD Teknis.
- Jumlah sumber daya manusia untuk pelayanan perizinan dan penanaman modal yang sesuai dengan kompetensi belum optimal.
- Sistem reward dan punishment pada sumberdaya manusia pelayanan perizinan dan penanaman modal yang belum efektif.
- Pengembangan system informasi untuk pelayanan perizinan yang belum optimal.
- Belum optimalnya data aktual pendukung LKPM

c. Peluang (Opportunity)

- Adanya peraturan Kepala Daerah tentang pelimpahan kewenangan perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang.
- Iklim investasi yang kondusif.
- Adanya OPD Teknis lain/ stakeholder yang mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang dalam pelayanan perizinan.
- Adanya system teknologi informasi berupa OSS RBA untuk percepatan pelayanan perizinan.
- Banyaknya potensi daerah yang bisa dijadikan sebagai peluang investasi

d. Ancaman (Thread)

- Kesadaran masyarakat dalam mengurus perizinan masih rendah
- Masih rendahnya pemahaman dari stakeholder/pemangku kepentingan terkait sistem perizinan yang baru
- Waktu pengurusan perizinan masih tergantung pada OPD teknis lain
- Kurang responsifnya masyarakat/pelaku usaha terhadap kegiatan sosialisasi Peraturan Penanaman Modal dan Perizinan

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui penetapan kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penyusunan Perjanjian/ Penetapan Kinerja tahun 2024 mengacu pada RKT Tahun 2024 Secara garis besar penetapan kinerja tahunan tahun 2023 meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, target, program kegiatan, dan anggaran yang digunakan untuk pencapaian target kinerja tersebut. Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang Tahun 2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Investasi Tahun n	1.900 Milyar
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89
		- Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,1
		- Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	71
3.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	A (80,5)

	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET		ANGGARAN
1.	Tersedianya Kebijakan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Presentase Dokumen Potensi Dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan	100%	Rp.	277.389.334,-
2.	Meningkatnya Jumlah Calon Investor PMA /PMDN yang berinvestasi	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Tindak Lanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	100%	Rp.	2.193.770.600,-

SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
3. Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP	82%	Rp. 320.408.300,-
4. Meningkatnya Pengguna Sistem Informasi Dalam Kegiatan Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	23%	Rp. 363.690.000,-
5. Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Modal	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal	80%	Rp. 544.442.940,- ,-
6. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	Rp. 11.143.464.237,-
JUMLAH				Rp. 14.843.165.411,-

2.2.1 Rencana Kerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2024 di atas, untuk mendukung sasaran strategis Perangkat Daerah didukung oleh 6 (enam) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Sub Kegiatan. Dengan total pagu anggaran Rp. 14.843.165.411,- (*Empat Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sebelas Rupiah*), yang sumber pendanaan berasal dari APBD dan DAK Non Fisik.

Untuk program dan Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 antara lain disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.1.1
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN JOMBANG

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2024		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan	
					Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)							
					K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10-6)	13=(11-7)	14	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2.18	URUSAN BIDANG PENANAMAN MODAL													
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PRESENTASE DOKUMEN POTENSI DAN PELUANG INVESTASI YANG DIMANFAATKAN	100%	100%	100%	277.389.334	0%	45.435.230	100%	Rp277.389.334	0%	-		
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Potensi dan Peluang Investasi yang dimanfaatkan	3 Dokumen	100%	2 Dokumen	277.389.334	0 dokumen	45.435.230	2 Dokumen	Rp277.389.334	0	-		
2.18.02.2.02.00	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	277.389.334	0 dokumen	45.435.230	2 dokumen	Rp277.389.334	0	-		
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE TINDAK LANJUT PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	100%	100%	100%	1.219.850.400	0%	27.182.051	100%	Rp2.193.770.600	0%	973.920.200		
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tindak lanjut penyelenggaraan promosi penanaman modal	105 Kali	100%	35 kali	1.219.850.400	0 kali	27.182.051	35 kali	Rp2.193.770.600	0	973.920.200		
2.18.03.2.01.00	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	6 dokumen	5 dokumen	6 dokumen	1.219.850.400	0 dokumen	27.182.051	6 dokumen	Rp2.193.770.600	0	973.920.200	Penyesuaian internal Bidang	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE LAYANAN PERIZINAN YANG DITERBITKAN TEPAT WAKTU SESUAI SOP	85%	92%	82%	329.410.900	88%	82.164.607	82%	Rp320.408.300	0%	-	9.002.600	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi	Presentase Pelayanan Perizinan Yang Diterbitkan	95%	89%	90%	294.945.900	95%	77.049.807	90%	Rp320.408.300	0%	25.462.400		
		Persentase Pengaduan Layanan Perizinan Yang Diselesaikan	100%	100%	100%	34.465.000	30%	5.114.800	100%		0%	-	34.465.000	
2.18.04.2.01.00	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	6.000 pelaku usaha	21.217 (Berusaha) + 2.182 (Non Berusaha) Pelaku Usaha	8.000 pelaku usaha	258.912.150	5925 pelaku usaha	69.096.307	12.000 pelaku usaha	Rp249.909.550	2000	-	9.002.600	Penambahan Belanja Kegiatan Pinter Ngaji (Perizinan Terpadu Langsung Jadi) 4 kali kegiatan
2.18.04.2.01.00	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	24 pelaku usaha	100%	24 pelaku usaha	34.465.000	7 pelaku usaha	5.114.800	24 pelaku usaha	Rp34.465.000	0	-		
2.18.04.2.01.00	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	2000 kegiatan usaha	800 kegiatan usaha	2000 kegiatan usaha	36.033.750	5131 kegiatan usaha	7.953.500	9000 kegiatan usaha	Rp36.033.750	0	-		



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2024		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)						
					K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10-6)	13=(11-7)	14
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA TERHADAP PERATURAN PENANAMAN MODAL	85%	118%	80%	544.442.940	34%	135.036.500	80%	Rp544.442.940	0%	-	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang patuh sesuai dengan ketentuan Penanaman Modal	290 Perusahaan	85 Perusahaan	95 Perusahaan	544.442.940	32 perusahaan	135.036.500	95 Perusahaan	Rp544.442.940	0	-	
2.18.05.2.01.00 04	Peyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya.	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	180 kegiatan usaha	100 kegiatan usaha	180 kegiatan usaha	395.673.000	0	14.600.000	180 kegiatan usaha	Rp395.673.000	0	-	
2.18.05.2.01.00 05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	30 Pelaku Usaha	100 pelaku usaha	90 pelaku usaha	114.395.440	90 pelaku usaha	108.960.500	90 pelaku usaha	Rp114.395.440	0	-	
2.18.05.2.01.00 06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	96 Kegiatan Usaha	18 monev	95 kegiatan usaha	34.374.500	32 Kegiatan Usaha	11.476.000	95 kegiatan usaha	Rp34.374.500	0	-	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH PENGGUNA SISTEM INFORMASI YANG PUAS DENGAN PELAYANAN PERIZINAN	23%	24%	23%	363.690.000	0%	20.016.147	23%	Rp363.690.000	0%	-	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengguna data dan informasi PM dan perizinan	11.500 pengguna		10000 pengguna	363.690.000	9062 pengguna	20.016.147	10000 pengguna	Rp363.690.000	6000	-	
2.18.06.2.01.00 02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	8 dokumen		8 dokumen	363.690.000	2 dokumen	20.016.147	8 dokumen	Rp363.690.000	0	-	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA APARATUR	100%	100%	100%	8.133.931.665	30%	2.971.286.989	100%	Rp11.143.464.237	0%	3.009.532.572	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%	123.330.000	30%	22.416.820	100%	Rp123.330.000	0%	-	
2.18.01.2.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	23.443.000	1 dokumen	9.961.000	3 dokumen	Rp23.443.000	0	-	
2.18.01.2.01.00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 dokumen	15 laporan	16 dokumen	99.887.000	7 dokumen	12.455.820	15 dokumen	Rp99.887.000	1	-	Penambahan Belanja jasa Konsultansi Penyusunan Proses Bisnis MPP Sesuai dengan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP nomor : 900/187/415.35/2024 tanggal 18 April 2024 Perihal Permohonan Penambahan Anggaran P-APBD Tahun 2024 (terlampir)



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2024		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)						
					K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10-6)	13=(11-7)	14
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%	4.821.811.816	30%	2.262.011.892	100%	Rp4.855.954.337	0%	34.142.521	
		Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	100%	100%		30%		100%		0%		
2.18.01.2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang	50 orang	30 orang/ bulan	4.625.983.816	30 orang/ bulan	2.212.525.392	30 orang/ bulan	Rp4.660.126.337	0	34.142.521	penyesuaian gaji dan TPP dari Bappeda
2.18.01.2.02.00 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 bulan	12 dokumen	185.850.000	4 dokumen	46.810.500	12 dokumen	Rp185.850.000	0	-	
2.18.01.2.02.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi i Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	17 laporan	1 laporan	2.688.000	1 laporan	2.676.000	1 laporan	Rp2.688.000	0	-	
2.18.01.2.02.00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 laporan	1 laporan	17 laporan	7.290.000	5 laporan	-	17 laporan	Rp7.290.000	0	-	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD	100%	100%	100%	71.524.000	30%	53.160.000	100%	Rp71.524.000	0%	-	
2.18.01.2.05.00 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50 paket		30 paket	18.000.000	0 paket	-	30 paket	Rp18.000.000	0	-	
2.18.01.2.05.00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 pegawai		44 orang	53.524.000	0 paket	53.160.000	44 orang	Rp53.524.000	0	-	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	688.799.249	30%	177.086.879	100%	Rp705.862.750	0%	17.063.501	
2.18.01.2.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 paket	14 paket	10 paket	8.845.500	4 paket	-	10 paket	Rp8.845.500	0	-	
2.18.01.2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80 paket	70 paket	60 paket	151.116.700	20 paket	36.336.500	60 paket	Rp160.987.650	0	9.870.950	Penyesuaian internal Bidang
2.18.01.2.06.00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 paket	6 paket	8 paket	5.328.599	5 paket	2.680.000	8 paket	Rp4.907.100	0	- 421.499	Penyesuaian internal Bidang
2.18.01.2.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	3 paket	131.110.000	3 paket	25.766.000	3 paket	Rp141.190.000	0	10.080.000	Penyesuaian internal Bidang
2.18.01.2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	114.978.450	2 paket	31.598.850	2 paket	Rp112.180.500	0	- 2.797.950	Penambahan belanja cetak untuk sarana informasi MPP
2.18.01.2.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	36 dokumen	3 dokumen	55.400.000	3 paket	16.180.000	3 dokumen	Rp55.400.000	0	-	Penambahan dari Pergeseran pada sub kegiatan 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar 15.000.000 (belanja publikasi)
2.18.01.2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 laporan	35 laporan	45 laporan	222.020.000	22 laporan	64.525.529	40 laporan	Rp222.352.000	5	332.000	Penambahan Belanja Koordinasi Persiapan MPP Digital Sesuai dengan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP nomor : 900/187/415.35/2024 tanggal 18 April 2024 Perihal Permohonan Penambahan Anejaran P-APBD Tahun 2024



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2024		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)						
					K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10-6)	13=(11-7)	14
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	1.146.116.800	30%	86.760.000	100%	Rp2.089.519.600	0%	943.402.800	
2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan	60 unit	23 unit	199 unit	1.146.116.800	0 unit	86.760.000	18 unit	Rp2.089.519.600	181 unit	943.402.800	Sesuai dengan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP nomor : 900/187/415.35/2024 tanggal 18 April 2024 Perihal Permohonan Penambahan Anggaran P-APBD Tahun 2024 (terlampir) Penambahan Belanja Modal Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang MPP : - Mesin Anjungan Antrian, - Tombol Panggil 12 unit - Display Loket 12 unit, - Insight Standing Kios K Touch Screen 1 unit, - Videotron Indoor 1 paket, - Neon Box Jenis Layanan 1 unit - Lemari Besi 2 unit, - Meja Kerja Pelayanan (Front office MPP) 15 unit - Kursi Hadap Pemohon (pelayanan MPP) 30 unit - Pengadaan Kursi Kerja Pelayanan MPP 15 unit - Pengadaan Meja Printer Pelayanan (Front office MPP)15 unit - Komputer AIO 6 unit
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	758.981.300	30%	212.505.031	100%	Rp840.046.200	0%	81.064.900	
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	1.800.000	4 laporan	800.000	12 laporan	Rp1.800.000	0	-	
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	255.000.000	4 laporan	61.731.191	12 laporan	Rp255.000.000	0	-	Penambahan Biaya Penambahan Daya Listrik kantor MPP serta biaya tagihan listrik setelah penambahan daya selama 3 bulan
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 jenis	8 jenis	11 jenis	502.181.300	4 jenis	149.973.840	11 laporan	Rp583.246.200	2	81.064.900	Penambahan: Untuk belanja tanaman hias indoor dan outdoor untuk MPP serta Jasa Pembasmi Tikus sebesar 20.700.000. Pengurangan : Pergeseran Honorarium Non PNS sebesar 27.000.000 (2org x 9 bln x 1,5jt) digeser pada sub kegiatan 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (belanja publikasi) sebesar 15.000.000 dan sub kegiatan 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor (belanja Makanan dan Minuman rapat dan
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%	523.368.500	30%	157.346.367	100%	Rp2.457.227.350	0%	1.933.858.850	
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	82.360.000	1 unit	9.552.250	1 unit	Rp77.537.000	0	- 4.823.000	Penyesuaian internal Bidang
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 unit	24 unit	24 unit	143.675.000	11 unit	17.494.450	24 unit	Rp141.675.000	0	- 2.000.000	Penyesuaian internal Bidang
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	2 gedung	2 unit	196.033.500	2 unit	104.929.667	2 unit	Rp2.136.665.350	0	1.940.631.850	Penggantian Biaya Pemeliharaan yang semula untuk pemeliharaan rutin digunakan untuk Pembenahan gedung kantor Mal Pelayanan Publik /gerai Pelayanan
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	90 unit	106 unit	132 unit	101.300.000	31 unit	25.370.000	132 unit	Rp101.350.000	0	50.000	Penambahan untuk biaya service AC
		TOTAL				10.868.715.239		3.281.121.524		14.843.165.411		3.974.450.172	



2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, telah ditetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan seleksi dari indikator-indikator kinerja sasaran yang digunakan oleh organisasi. Berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan Daya Tarik Investasi 100%	Nilai Investasi Tahun n	Nilai Realisasi Investasi (Nilai realisasi investasi berasal dari data pada OSS dan dari laporan LKPM pada tahun n yang bersumber dari PMA-PMDN-IUMK)	Laporan Data Realisasi Investasi Daerah	DPM PTSP KABUPATEN JOMBANG
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM layanan perizinan tahun (n) (Nilai IKM layanan perizinan didapatkan dari hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan pada DPMPSTP. Nilai IKM ini berasal dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas 9 unsur yakni : - Persyaratan - Sistem, Mekanisme, dan Prosedur - Waktu Penyelesaian - Biaya/Tarif - Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan - Kompetensi Pelaksana - Perilaku Pelaksana - Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan - Sarana dan prasarana	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	DPM PTSP KABUPATEN JOMBANG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Nilai IPP di bidang PM dan Perizinan tahun (n) (Nilai IPP di bidang PM dan Perizinan didapat dengan menghitung nilai indeks yang merupakan perkalian antara nilai aspek dengan bobot aspek. Nilai IPP ini terdiri dari 6 aspek yakni - Kebijakan Pelayanan, - Profesionalisme SDM, - Sarana Prasarana, - Sistem Informasi Pelayanan Publik, - Konsultasi dan Pengaduan serta - Inovasi.	Laporan Hasil Indeks Pelayanan Publik (IPP)	DPM PTSP KABUPATEN JOMBANG
		Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik Tahun (n) Nilai kepatuhan untuk mendorong pemenuhan terhadap standar pelayanan publik dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik dengan variabel: - Standar pelayanan, - maklumat pelayanan, - sistem informasi pelayanan publik, - sarana dan prasarana fasilitas, - pelayanan khusus, - Pengelolaan pengaduan, - penilaian kinerja, - visi, misi dan moto pelayanan, - atribut dan - tingkat pelayanan terpadu.	Laporan Hasil Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	DPM PTSP KABUPATEN JOMBANG
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah tahun (n) Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah merupakan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD yang terdiri dari 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja.	Laporan Hasil Nilai Evaluasi SAKIP	DPM PTSP KABUPATEN JOMBANG

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Dan dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang merupakan instansi pemerintah bagian dari organisasi Pemerintah Kabupaten Jombang yang memiliki tugas mengelola urusan perizinan di Kabupaten Jombang. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

LKjIP Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode/tahun tertentu. Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Dengan demikian setiap instansi pemerintah harus memberikan pertanggungjawaban dalam pengertian mampu menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan atas

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang (performance improvement).

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Skala Capaian Kinerja

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	>110%-120%	Istimewa (Sangat Berhasil)
2	>90%-110%	Baik (Berhasil)
3	>70%-80%	Butuh Perbaikan (Cukup)
4	>50%-70%	Kurang
5	0%-50%	Sangat Kurang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pada tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang telah melaksanakan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, yang meliputi 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya Realisasi Investasi
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

3.1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pengukuran realisasi kinerja tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dengan hasil realisasi kinerja. Untuk melakukan analisa capaian kinerja dapat mengacu pada Pengukuran Kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan sasaran dan indikator kinerjanya, kegagalan, serta upaya-upaya apa yang harus dilanjutkan maupun upaya untuk mengatasi kegagalan.

Untuk target nilai realisasi investasi tahun 2024 merupakan target secara keseluruhan yang berasal dari PMA, PMDN dan IUMK sebesar 1,9 Trilyun rupiah.

Pengukuran kinerja sasaran terhadap target kinerja tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

Tabel 3.1.1
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS-PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	1.900 (dalam Milyar Rp /PMA-PMDN-IUMK)	2.114.861.515.725	111,31
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Presentase Dokumen Potensi Dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan	100%	100%	100
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Tindak Lanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	100%	100%	100
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal	80%	275,79%	344,74

SASARAN STRATEGIS-PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89	91,08	102,34
	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,1	4,25	103,66
	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	71	88,44	124,56
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai Sop	82%	95,38%	116,32
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	23%	236%	1026,09
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80,5 (A)	80,74	100,30
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	99,50%	99,5

a. Sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi

Target realisasi investasi tahun 2024 sebesar Rp. 1.900.000.000.000,- (PMA-PMDN-IUMK) sedangkan realisasi investasi tahun 2024 sebesar Rp. 2.114.861.515.725, berasal dari PMA sebesar Rp. 627.321.323.611,- dan PMDN sebesar Rp. 924.171.523.908,- serta IUMK sebesar Rp. 563.368.668.206,- . Ini berarti bahwa realisasi investasi tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, realisasi investasi tahun 2024 (PMA-PMDN-IUMK) telah mencapai 111,31% dari target yang ditetapkan dan tergolong dalam kategori "Istimewa (Sangat Berhasil)" karena persentase capaian kinerja lebih dari 110%.

Sedangkan bila dilihat dari realisasi yang berasal dari PMA dan PMDN sebesar Rp. 1.551.492.847.519,- dengan target khusus hanya untuk PMA-PMDN dari 1,9 trilyun Rupiah yaitu sebesar 1,5 trilyun rupiah, sehingga capaian kinerja untuk PMA-PMDN terhadap target sebesar 103,43%, dan tergolong dalam kategori "Baik (Berhasil)" karena persentase capaian kinerja lebih dari 90% dan kurang dari 110%.

Hal ini disebabkan kebijakan pemerintah yang mendukung investasi, seperti peraturan yang lebih mudah dan biaya yang lebih rendah, Kondisi ekonomi yang stabil dan pertumbuhan ekonomi yang positif serta partisipasi aktif dari sektor swasta dalam investasi.

Program pendukung Sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi, antara lain sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Target Presentase Dokumen Potensi Dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan sebanyak 100%, terealisasi 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100% *dengan kategori Baik*. Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota terealisasi 2 dokumen dari target 2 dokumen, Terealisasi dokumen Updating Peta Potensi dan Peluang Investasi Kab Jombang Pendukung Web GIS potensi 2024 dan tersusun Video Profil sudah dimanfaatkan menjadi buklet leaflet.

2. Program Promosi Penanaman Modal

Target kinerja Persentase Tindak Lanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal sebesar 100% terealisasi 82,85% sehingga capaian kinerja sebesar 82,85% *dengan kategori Baik*. Telah terlaksana tindak lanjut pada kegiatan Bussines Gathering, APKASI, GPII, Seminar PM, dan EJIF.

3. Program Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal

Target kinerja Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal sebesar 80% terealisasi sebesar 275,79%, sampai dengan TB IV terlaksana 262 monev pelaku usaha pada perusahaan, dari target total sejumlah 95 perusahaan di Tahun 2024, sehingga capaian kinerja nya 345% *dengan kategori Istimewa*.

b. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Sasaran strategis meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan terdapat 3 (tiga) indikator Kinerja antara lain sebagai berikut :

❑ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2024 sebesar 89, sedangkan realisasi nilai IKM tahun 2024 sebesar 91,08. Ini berarti bahwa realisasi nilai IKM tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, capaian kinerja realisasi nilai IKM tahun 2024 telah mencapai 102,34% dari target yang ditetapkan dan tergolong dalam kategori "Baik (Berhasil)" karena persentase capaian kinerja lebih dari 90% dan kurang dari 110%.

❑ Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Target Indeks Pelayanan Publik (IPP) tahun 2024 sebesar 4,1, sedangkan realisasi IPP tahun 2024 sebesar 4,25. Ini berarti bahwa realisasi IPP tahun 2024

telah melampaui target yang ditetapkan. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, capaian kinerja realisasi IPP tahun 2024 telah mencapai 103,66 dari target yang telah ditetapkan dan tergolong dalam kategori "Baik (Berhasil)" karena persentase capaian kinerja lebih dari 90% dan kurang dari 110%.

❑ Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik

Target Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik tahun 2024 sebesar 71, dengan sedangkan realisasi sebesar 88,44. Ini berarti bahwa realisasi Indeks Kepatuhan Pelayanan tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, capaian kinerja realisasi Indeks Kepatuhan Pelayanan tahun 2024 telah mencapai 124,56 dari target yang telah ditetapkan dan tergolong dalam kategori "Istimewa (Sangat Berhasil)" karena persentase capaian kinerja lebih dari 110%.

Faktor penyebab nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik tercapai melebihi target dikarenakan komitmen tinggi aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama dibidang perizinan dan non perizinan yang efektif, partisipasi aktif dari masyarakat, dan kualitas sumber daya manusia yang baik.

Program Pendukung sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan antara lain:

1. Program Pelayanan Penanaman Modal

Target kinerja Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP sebesar 82%, dapat terealisasi 95,38%. Jumlah izin yang terbit pada tahun 2024 sebanyak 30853 izin, 29429 izin terbit sesuai standart pelayanan (Izin Tepat Waktu) sehingga capaian kinerja sebesar 116% *dengan kategori Baik*.

2. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Target kinerja 23% terealisasi sebesar 236%. Tahun 2024 jumlah pengguna sistem informasi yang puas sebesar 46.140 pengguna. Pada tahun 2023 jumlah pengguna yang puas adalah 13.728 pengguna, sehingga capaian kinerja sebesar 1027% di Tahun 2024. *dengan kategori Istimewa*.

c. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah tahun 2024 sebesar 80,5 (A), sedangkan realisasi nilai AKIP Pemerintah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perangkat Daerah tahun 2024 sebesar 80,74 (A). Ini berarti bahwa realisasi nilai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Perangkat Daerah tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, capaian kinerja realisasi nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah tahun 2024 telah mencapai 100,30 dari target yang telah ditetapkan dan tergolong tergolong dalam kategori "Baik (Berhasil)" karena persentase capaian kinerja lebih dari 90% dan kurang dari 110%.

Nilai evaluasi AKIP PD Tahun 2024 merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKP yang dipantau di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1.2
Hasil Evaluasi Implementasi AKIP
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang Tahun 2024

No	Komponen	LKE	Evaluasi Lapangan	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1.	Perencanaan Kinerja	26,76	15,37	30%	24,48
2.	Pengukuran Kinerja	26,67	17,00	30%	24,73
3.	Pelaporan Kinerja	13,39	9,7	15%	12,65
4.	Evaluasi Kinerja	18,76		25%	18,88
	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja			100%	80,74

Berdasarkan capain di atas dalam kategori "Baik" ini disebabkan oleh perencanaan yang matang, implementasi yang baik, serta dukungan SDM dan teknologi yang memadai. Keterlibatan dan komitmen pimpinan juga menjadi faktor utama dalam pencapaian target tersebut. Secara keseluruhan, meskipun sedikit melebihi target, Nilai AKIP PD pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang tahun 2024 dapat dikategorikan sebagai berhasil dan masih memiliki potensi untuk lebih ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang

Program Pendukung Sasaran Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah antara lain :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
Target kinerja Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur 100% dapat terealisasi 100% sehingga tercapai sebesar 100% *dengan kategori Baik*.

3.1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Dua (2) Tahun Terakhir

Berikut realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu 2023 serta beberapa tahun sebelumnya 2022, ditunjukkan dalam table sebagai berikut :

Tabel 3.1.3
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan 2 (dua) Tahun Terakhir (2023 dan 2022)

SASARAN STRATEGIS - PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	2022			2023			2024		
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkat Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	1800 (dalam Milyar Rp/ PMA dan PMDN)	1.633.411.613.631,-	90,75	1400 (dalam Milyar Rp/ PMA dan PMDN)	1.715.913.003.483,-	122,57	1.900 (dalam Milyar Rp/ PMA-PMDN-IUMK)	2.114.861.515.725	111,31
								1.500 (dalam Milyar Rp/ Khusus PMA- PMDN)	1.551.492.847.519	103,43
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan Iklim Pm Yang Dihasilkan	1 Kebijakan	1 kebijakan	100	1 Kebijakan	1 kebijakan	100	1	1	100
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Tindakanjnt Promosi Penanaman Modal	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal	75%	123,53%	164,71	75%	117,65%	156,86	80%	275,79%	344,74
Meningkat nya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,75	85,11	96,99	89,85	89,94	100,1	89	91,08	102,34
	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,1	4,61	112,44	4,15	4,43	106,75	4,1	4,25	103,66
	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	-	71	88,44	124,56
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Layanan Perizinan Yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan	80%	90,94%	113,67	82%	92,32%	112,58	82%	95,38%	116,32

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SASARAN STRATEGIS - PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	2022			2023			2024		
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi yang puas dengan pelayanan perizinan	23%	27%	116%	23%	23,71%	103,09	23%	236,00%	1026,09
Meningkat nya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	81	80,39	99,24	81	81,38	100,47	80,5 (A)	80,74	100,29814
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	99,5

a. Sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi

Target realisasi investasi tahun 2024 sebesar Rp. 1.900.000.000.000,- (PMA-PMDN-IUMK) sedangkan realisasi investasi tahun 2024 sebesar Rp. 2.114.861.515.725, berasal dari PMA sebesar Rp. 627.321.323.611,- dan PMDN sebesar Rp. 924.171.523.908,- serta IUMK sebesar Rp. 563.368.668.206,- . Ini berarti bahwa realisasi investasi tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, realisasi investasi tahun 2024 (PMA-PMDN-IUMK) telah mencapai 111,31% dari target yang ditetapkan dan tergolong dalam kategori "Istimewa (Sangat Berhasil)" karena persentase capaian kinerja lebih dari 110%. Sedangkan bila dilihat dari realisasi yang berasal dari PMA dan PMDN sebesar Rp. 1.551.492.847.519,- dengan target hanya PMA-PMDN dari 1,9 trilyun Rupiah yaitu sebesar 1,5 trilyun rupiah, sehingga capaian kinerja untuk PMA-PMDN terhadap target sebesar 103,43%, dan tergolong dalam kategori "Baik (Berhasil)" karena persentase capaian kinerja lebih dari 90% dan kurang dari 110%.

Target realisasi investasi tahun 2023 sebesar Rp 1.400.000.000.000 dan dapat terealisasi sebesar Rp 1.715.913.003.483,-. Dari nilai realisasi investasi daerah tersebut, melebihi target sehingga capaian kinerja sebesar 122,57% berada dalam kategori Istimewa (Sangat Berhasil), karena berada di kisaran >110%-120%.

Target realisasi investasi tahun 2022 sebesar Rp 1.800.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.633.411.613.631,-. Dari nilai realisasi investasi tersebut, capaian kinerja sasaran sebesar 90,75% berada dalam kategori Baik (Berhasil), karena berada di kisaran >90%-110%.

□ Nilai realisasi Investasi (2024 Vs 2023 Vs 2022)

Realisasi investasi tahun 2022 sebesar Rp. 1.633.411.613.631, sedangkan realisasi investasi tahun 2023 sebesar Rp. 1.715.913.003.483. Realisasi investasi tahun 2024 sebesar Rp. 2.114.861.515.725 (PMA-PMDN-IUMK), yang berarti bahwa realisasi investasi tahun 2024 telah meningkat sebesar 23,25% dibandingkan dengan tahun 2023, dan sebesar 29,48% dibandingkan dengan tahun 2022.

Sedangkan nilai investasi di tahun 2024 berdasarkan dari PMA-PMDN yaitu sebesar Rp. 1.551.492.847.519, maka terjadi penurunan dari tahun 2023 sebesar 5,98% dan 5,02% dari tahun 2022.

□ Capaian Kinerja Tahun 2024 Vs 2023

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Capaian kinerja tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 122,57%. Namun, capaian 111,31% (PMA-PMDN-IUMK) di tahun 2024 masih tergolong sangat baik dan masuk dalam kategori Istimewa (Sangat Berhasil). Sedangkan kalau hanya untuk PMA-PMDN dengan capaian sebesar 103,43%, masuk dalam kategori Baik (Berhasil). Penurunan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti kondisi pasar global yang lebih tidak pasti atau fluktuasi ekonomi, yang mempengaruhi keputusan investasi.

❑ Capaian Kinerja Tahun 2024 Vs 2022

Capaian kinerja tahun 2024 jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 yang hanya mencapai 90,75%. Sedangkan kalau berdasarkan PMA-PMDN maka capaian di tahun 2024 sebesar 103,43%. Kinerja 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan dan menggambarkan pertumbuhan positif dibandingkan tahun 2022, dan capaian ini meningkat dengan adanya investasi yang berasal dari IUMK.

Faktor yang menyebabkan peningkatan ini bisa jadi karena perbaikan iklim investasi, kebijakan pemerintah yang lebih mendukung, atau adanya sektor-sektor ekonomi yang lebih berkembang. Dari analisa capaian di atas dapat disimpulkan:

- Tahun 2024 menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik meskipun sedikit menurun dibandingkan tahun 2023, dan capaian ini meningkat dengan adanya investasi berasal dari IUMK.
- Pada 2024, terdapat stabilitas dan pertumbuhan meskipun kondisi ekonomi global mungkin mempengaruhi sedikit lebih banyak dibandingkan tahun 2023.
- Kinerja tahun 2022 menunjukkan kekurangan dalam pencapaian target, namun terdapat peningkatan yang jelas pada tahun 2023 dan 2024.

Program Pendukung Sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi, antara lain sebagai berikut :

- Pada tahun 2023 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan target kinerja Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan Iklim Pm Yang Dihasilkan sebanyak 1 kebijakan, dapat terealisasi 1 kebijakan dengan capaian 100%. Dibandingkan dengan tahun 2022 presentase capaian kinerja dengan target sebanyak 1 kebijakan, juga terealisasi 1 kebijakan (peta potensi peluang investasi daerah Kabupaten Jombang) dengan capaian 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa target kinerja Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Iklim Pm Yang Dihasilkan setiap tahunnya dapat mempertahankan capaian kinerjanya 100% *dengan kategori Baik* dan mencapai target yang ditentukan yaitu dokumen peta potensi peluang investasi di tahun 2022 dan Tersusun IPRO 3 Sektor (Ternak Sapi di Desa Jenis Gelaran Bareng) di tahun 2023. Sedangkan Pada Tahun 2024 dengan target sebanyak 100%, terealisasi 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100% *dengan kategori Baik*. Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota terealisasi 2 dokumen dari target 2 dokumen, Terealisasi dokumen Updating Peta Potensi dan Peluang Investasi Kab Jombang Pendukung Web GIS potensi 2024 dan tersusun Video Profil sudah dimanfaatkan menjadi buklet leaflet

- Pada tahun 2023 Promosi Penanaman Modal dengan target kinerja Persentase Tindaklanjut Promosi Penanaman Modal 100%, dapat terealisasi 100%. Dibandingkan dengan tahun 2022 target kinerja dengan target 100%, dengan capaian 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa target kinerja Persentase Tindaklanjut Promosi Penanaman Modal bisa mencapai indikator kinerjanya dengan target yang ditentukan pada tahun 2022 telah dilaksanakan tindak lanjut dari 20 peserta bisnis gathering yang mengisi form kepeminatan. Sehingga capaian kinerja pada tahun 2022-2023 tercapai 100 % *dengan kategori Baik*. Sedangkan pada tahun 2024 dengan target sebesar 100% terealisasi 82,85% sehingga capaian kinerja sebesar 82,85% *dengan kategori Baik*. Telah terlaksana tindak lanjut pada kegiatan Bussines Gathering, APKASI, GPII, Seminar PM, dan EJIF
- Pada tahun 2023 Program Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dan Perizinan dengan target kinerja Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal sebesar 75% dapat terealisasi 117,65% dengan capaian 156,86%. Dibandingkan dengan tahun 2022 target kinerja dengan target 75%, realisasi kinerja 123,53% sehingga capaian kinerjanya 164,71%. Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan target kinerja Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal bisa mencapai indikator kinerjanya dengan target yang ditentukan yaitu tahun 2022 terdapat 105 perusahaan yang telah melaporkan LKPM dari total target 85 perusahaan. Sedangkan Terdapat 100 perusahaan yang telah melaporkan LKPM pada TB IV dari total target 85 perusahaan di Tahun 2023. Dan *pada tahun 2024 dari target* sebesar 80% terealisasi sebesar 275,79%, sampai dengan TB IV terlaksana 262

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

monev pelaku usaha pada perusahaan, dari target total sejumlah 95 perusahaan di Tahun 2024, sehingga capaian kinerja nya 345% *dengan kategori Istimewa*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal dari tahun 2022 dengan capaian 164,71% dan 2023 dengan capaian 156,86% dan tahun 2024 dengan capaian 345 % terus mengalami kenaikan *dengan predikat istimewa*.

b. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Sasaran strategis meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan terdapat 3 (tiga) indikator Kinerja antara lain sebagai berikut:

❑ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Target Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 sebesar 89 dan terealisasi sealisasi sebesar 91,08 dengan Capaian kinerja sebesar 102,34% berada dalam kategori Baik (Berhasil), karena berada di kisaran >90%-110%. Di tahun 2023 ditargetkan sebesar 89,85, dan terealisasi sealisasi sebesar 89,94 dengan Capaian kinerja sebesar 100,10% berada dalam kategori Baik (Berhasil), karena berada di kisaran >90%-110%. Sedangkan target tahun 2022 sebesar 87,75, terealisasi sealisasi sebesar 85,11 dengan Capaian kinerja sebesar 96,99% berada dalam kategori Baik (Berhasil), karena berada di kisaran >90%-110%.

Berdasarkan data di atas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Tahun 2024 dibandingkan tahun 2023, pada tahun 2024, IKM melebihi target yang ditetapkan dengan capaian 91,08, sementara pada tahun 2023 hanya sedikit lebih tinggi daripada target (89,94).
- Tahun 2024 dibandingkan tahun 2022 capaian IKM pada tahun 2024 mengalami peningkatan signifikan (dari 85,11 ke 91,08).
- Meskipun tahun 2022 sempat mengalami penurunan (capaian 97%), tren keseluruhan menunjukkan perbaikan kualitas pelayanan.
- Faktor Pendukung: Peningkatan kualitas pelayanan dan perbaikan yang berkelanjutan dapat menjadi faktor utama dalam peningkatan kepuasan masyarakat. Misalnya, efisiensi pelayanan, komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat, serta program-program peningkatan kualitas layanan publik.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Penyebab Penurunan (2022): Penurunan yang signifikan pada tahun 2022 (85,11) dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan, keterbatasan sumber daya, atau kurangnya inovasi dalam pelayanan yang disediakan.

□ Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Target IPP Tahun 2024 sebesar 4,1 dan terealisasi sebesar 4,25 dengan Capaian kinerja sebesar 103,66% berada dalam kategori Baik (Berhasil) karena berada di kisaran >90%-110%. Di tahun 2023 ditargetkan sebesar 4,15 dan terealisasi sebesar 4,43 dengan Capaian kinerja sebesar 106,75% berada dalam kategori Baik (Berhasil) karena berada di kisaran >90%-110%. Sedangkan di Tahun 2022 target IPP sebesar 4,1 dan terealisasi sebesar 4,61 dengan Capaian kinerja sebesar 112,44% berada dalam kategori Istimewa (Sangat Berhasil) karena berada di kisaran >110%-120%.

Berdasarkan data di atas Indeks Pelayanan Publik (IPP) dapat disimpulkan:

- Tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 Capaian IPP pada tahun 2024 (4,25) sedikit lebih tinggi daripada target yang ditetapkan (4,1), meskipun lebih rendah daripada capaian tahun 2023 (4,43).
- Tahun 2024 dibandingkan tahun 2022, di tahun 2024, capaian IPP (4,25) masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 (4,61), yang menunjukkan sedikit penurunan dalam kualitas pelayanan dibandingkan dua tahun sebelumnya disebabkan oleh perubahan kebijakan atau faktor eksternal seperti jumlah pengguna layanan yang meningkat tanpa diimbangi sumber daya yang cukup
- Faktor Pendukung Peningkatan pelayanan yang lebih ramah, efisien, dan tepat waktu bisa menjadi faktor kunci dalam mempertahankan atau sedikit menurunkan nilai IPP. Program peningkatan kompetensi pegawai dan penggunaan teknologi dalam layanan publik bisa memberikan dampak positif.
- Penyebab Penurunan (2022 vs 2024) Penurunan dari 4,61 pada tahun 2022 ke 4,25 pada tahun 2024 mungkin disebabkan oleh beberapa faktor seperti masalah operasional atau keterbatasan anggaran yang mempengaruhi pengadaan fasilitas atau pelatihan yang diperlukan untuk mempertahankan kualitas layanan.

□ Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik

Target Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik Tahun 2024 sebesar 4,1 dan terealisasi sealisasi sebesar 4,25 dengan Capaian kinerja sebesar 103,66% berada dalam kategori Baik (Berhasil) karena berada di kisaran >90%-110%.

Capaian Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik tahun 2024 adalah 88,44 dengan target 71. Capaian ini berkontribusi pada persentase sebesar 124,56%, berdasarkan kategori capaian kinerja tergolong dalam kategori "Istimewa (Sangat Berhasil)" karena berada di kisaran >110%-120%. Untuk tahun 2022-2023 belum ada karena Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik baru diimplementasikan pada tahun 2024.

Faktor Pendukung Implementasi sistem yang lebih baik dalam memantau dan mengevaluasi kepatuhan terhadap prosedur pelayanan publik, serta peran serta pegawai yang lebih tinggi dalam mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku, dapat menjadi faktor yang mendukung capaian ini.

Penyebab Keberhasilan (2024) Keberhasilan capaian IKPP pada tahun 2024 kemungkinan karena adanya perhatian yang lebih besar terhadap kepatuhan dan sistem penilaian yang lebih baik, serta adanya evaluasi atau audit terhadap kepatuhan yang lebih intensif.

Program Pendukung Sasaran Meningkatkan Realisasi Investasi, antara lain sebagai berikut :

- Program Pelayanan Penanaman Modal

Target kinerja Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai Sop pada tahun 2024 dengan target sebesar 82%, dapat terealisasi 95,38% karena Sampai dengan TB IV jumlah izin yang terbit sejumlah 30853 izin, 29429 izin terbit sesuai standart pelayanan (Izin Tepat Waktu) sehingga capaian kinerja sebesar 116% *dengan kategori Baik*. Pada Tahun 2023 Program Pelayanan Penanaman Modal dengan target kinerja Persentase Layanan Perizinan Yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan sebesar 82% dapat terealisasi 92,32% sehingga capaian kinerja sebesar 112,58%. Sedangkan pada tahun 2022 Program Pelayanan Penanaman Modal dengan target kinerja Persentase Layanan Perizinan Yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan sebesar 80% dapat terealisasi 90,94% sehingga capaian kinerja sebesar 113,67%. Berdasarkan uraian diatas dapat dapat disimpulkan bahwa Persentase Layanan Perizinan Yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan dari tahun 2022

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

dengan capaian 113,67% dan tahun 2023 dari capaian 112,58% mengalami penurunan 1,09%. Sedangkan dari tahun 2024 dengan capaian 116 % mengalami kenaikan dari capaian tahun 2023 sebesar 3,42%.

- Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Pada tahun 2024 target kinerja 23% terealisasi sebesar 236%. Capaian kinerja sebesar 1027% di Tahun 2024 dengan kategori *Istimewa*. Pada tahun 2023 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan target kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi yang puas dengan pelayanan perizinan 23% dapat terealisasi 23,71% sehingga tercapai sebesar 103,09%. Pada tahun 2022 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan target kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi yang puas dengan pelayanan perizinan 23% dapat terealisasi 27% sehingga tercapai sebesar 116%. Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan target kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi yang puas dengan pelayanan perizinan Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan target kinerja 23% terealisasi sebesar 236%. Berdasarkan uraian diatas Pada Tahun 2024 jumlah pengguna sistem informasi yang puas sebesar 46.140 pengguna. Pada tahun 2023 jumlah pengguna yang puas adalah 13.728 pengguna, sehingga capaian kinerja sebesar 1027% di Tahun 2024. Pada tahun 2023 pengguna sistem informasi yang puas sebesar 13.728 pengguna. Pada tahun 2022 jumlah pengguna yang puas adalah 5.541 pengguna, sehingga terdapat peningkatan sebesar 247,75%. Pengguna data terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.

c. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Nilai evaluasi AKIP pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 80,5 (A), dengan realisasi nilai evaluasi AKIP sebesar 80,74 (A) sehingga capaian kinerja sebesar 100,30%. Berdasarkan kategori capaian kinerja tergolong dalam kategori Baik (Berhasil) karena berada dalam rentang 90%-110%. Sedangkan pada tahun 2023 ditetapkan target sebesar 81 dengan realisasi nilai evaluasi AKIP sebesar 81,38 sehingga capaian kinerja sebesar 100,47% tergolong dalam dengan kategori Baik (Berhasil) karena berada dalam rentang 90%-110%. Sedangkan pada tahun 2022 target evaluasi AKIP sebesar 81, dengan realisasi sebesar 80,39 sehingga capaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

kinerja sebesar 99,24% dan tergolong dalam kategori Baik (Berhasil) karena berada dalam rentang 90%-110%.

Berdasarkan uraian di atas nilai evaluasi AKIP Dinas Penanaman Modal dan PTSP dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Tahun 2022 realisasi lebih rendah dari target (80,39 vs. 81), menunjukkan sedikit ketidaktercapaian. Tahun 2023 realisasi melampaui target (81,38 vs. 81), menandakan perbaikan. Sedangkan Tahun 2024 realisasi juga melampaui target (80,74 vs. 80,5), meskipun tidak sebesar capaian tahun 2023.
- Perbandingan tahun 2022, realisasi tahun 2024 lebih tinggi (80,74 vs. 80,39), menunjukkan peningkatan akuntabilitas kinerja dibandingkan dua tahun sebelumnya dengan persentase capaian juga lebih baik di tahun 2024 (100,3% dibandingkan 99,25% di tahun 2022). Ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas dalam pencapaian target akuntabilitas.
- Perbandingan tahun 2023, realisasi tahun 2024 sedikit lebih rendah (80,74 vs. 81,38), menunjukkan sedikit penurunan dengan persentase capaian juga sedikit menurun dari 100,47% di tahun 2023 menjadi 100,3% di tahun 2024. Meskipun demikian, capaian ini masih dalam kategori Baik (Berhasil), yang berarti akuntabilitas kinerja masih terjaga.

Beberapa faktor yang bisa mempengaruhi capaian kinerja evaluasi AKIP pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP antara lain:

- Perencanaan dan Implementasi program yang sesuai dengan standar akuntabilitas menjadi faktor penting dalam mencapainya.
- Kualitas dan kapasitas SDM mempengaruhi pelaksanaan evaluasi akuntabilitas, dengan SDM aparatur yang terlatih dan berkompeten cenderung lebih mampu mencapai target akuntabilitas yang ditetapkan.
- Penggunaan teknologi informasi yang mendukung pelaporan dan pemantauan kinerja dapat membantu Perangkat daerah dalam mencapai dan bahkan melebihi target akuntabilitas.
- Komitmen Pimpinan yang tinggi terhadap akuntabilitas dan transparansi akan mendorong kinerja seluruh anggota organisasi untuk fokus pada pencapaian target evaluasi.

Program Pendukung Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP, antara lain sebagai berikut:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
Tahun 2024 dengan target kinerja Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur 100% dapat terealisasi 99,50% sehingga tercapai sebesar 99,50% dengan kategori Baik Sedangkan tahun 2024 dengan target 100% dapat terealisasi 100% sehingga tercapai sebesar 100%. Pada tahun 2022 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota dengan target kinerja Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur 100% dapat terealisasi 100% sehingga tercapai sebesar 100%.

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah

Berikut realisasi kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan target RPJMD dalam dokumen Perubahan Renstra 2024-2026, ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1.4
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024
dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	2.100 (dalam Milyar Rp)	2.114.861.515.725	0,708%
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan Iklim Pm Yang Dihasilkan	100%	100%	0,00%
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Tindaklanjut Promosi Penanaman Modal	100%	100%	0,00%
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal	80%	275,79%	134,42%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	91,08	4,69%
	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,25	4,25	0
	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	75	88,44	117,92%
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Layanan Perizinan Yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan	82%	95,38%	3,31%
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi	Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi yang puas dengan pelayanan perizinan	23%	236%	895,36%

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penanaman Modal				
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	81,50 (A)	80,74	-0,93%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	99,50%	-0,50%

a. Sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi

Target realisasi investasi Jangka Menengah akhir periode Renstra Tahun 2024-2026 sebesar Rp 2.100.000.000.000, dengan realisasi investasi tahun 2024 sebesar Rp 2.114.861.515.725. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, realisasi investasi tahun 2024 telah mencapai 100,71% dari target Jangka Menengah akhir periode Renstra Tahun 2024-2026 yang ditetapkan dan berada dalam rentang 90%-110%, yang masuk dalam Kategori Baik (Berhasil). Tingkat kemajuan investasi dibandingkan target jangka menengah adalah sebesar 0,708%. Nilai investasi di tahun 2024 sebesar Rp. 2.114.861.515.725, berasal dari PMA sebesar Rp. 627.321.323.611,-(29,66%) dan PMDN sebesar Rp. 924.171.523.908,-(43,70%) serta IUMK sebesar Rp. 563.368.668.206,-(26,64%). Meskipun realisasi investasi sudah melampaui target, masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam menarik lebih banyak investasi asing dan meningkatkan efisiensi dalam proses investasi. Untuk mencapai kategori Istimewa (Sangat Berhasil) di masa depan, perlu dilakukan optimalisasi kebijakan, peningkatan infrastruktur, serta upaya promosi investasi yang lebih agresif.

Program pendukung:

- Pada tahun 2024 untuk Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan indikator Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan Iklim Pm Yang Dihasilkan terealisasi 100%, dan dengan target akhir periode RPJMD /Renstra tahun 2024-2026 sebesar 100%. Sehingga capaian kinerja ini sudah terpenuhi di tahun 2024 dengan tingkat kemajuan sebesar 0%.
- Pada tahun 2024 untuk Program Promosi Penanaman Modal dengan indikator Persentase Tindaklanjut Promosi Penanaman Modal terealisasi 100%, dan dengan target akhir periode RPJMD /Renstra tahun 2024-2026 sebesar 100%. Sehingga

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

capaian kinerja ini sudah terpenuhi di tahun 2024 dengan tingkat kemajuan sebesar 0%.

- Pada tahun 2024 untuk Program Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dan Perizinan dengan indikator Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal terealisasi 275,79%, dan dengan target akhir periode RPJMD /Renstra tahun 2024-2026 sebesar 80%. Sehingga capaian kinerja ini sudah terpenuhi di tahun 2024 dengan tingkat kemajuan sebesar 134,42%.

b. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**❑ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Target Jangka Menengah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 87, realisasi nilai IKM tahun 2024 sebesar 91,08. Ini berarti bahwa realisasi nilai IKM tahun 2024 telah melampaui target rencana jangka menengah yang ditetapkan. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, capaian kinerja realisasi nilai IKM tahun 2024 telah mencapai 104,69% dari target jangka menengah yang ditetapkan dan tergolong dalam kategori "Baik (Berhasil)" karena persentase capaian kinerja lebih dari 90% dan kurang dari 110%. Tingkat kemajuan IKM dibandingkan target jangka menengah sebesar 4,69%.

❑ Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Target Jangka Menengah Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 4,25, sedangkan realisasi IPP tahun 2024 sebesar 4,25. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, capaian kinerja realisasi IPP tahun 2024 telah mencapai 100% dari target jangka menengah yang telah ditetapkan dan tergolong dalam kategori "Baik (Berhasil)" karena persentase capaian kinerja lebih dari 90% dan kurang dari 110%. Untuk tingkat kemajuan 0% karena realisasi sama dengan target jangka menengah.

❑ Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik

Target Jangka Menengah Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik sebesar 75, sedangkan realisasi IKPP tahun 2024 sebesar 88,44. Ini berarti bahwa realisasi Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik tahun 2024 telah melampaui target jangka menengah yang ditetapkan. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, capaian kinerja realisasi Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik tahun 2024 telah mencapai 117,92 dari target jangka menengah yang telah ditetapkan dan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

tergolong dalam kategori "Istimewa (Sangat Berhasil)" karena persentase capaian kinerja lebih dari 110%. Tingkat kemajuan Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik dibandingkan target jangka menengah sebesar 17,92%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat positif. Dua indikator (IKM dan IPP) masuk dalam kategori Baik (Berhasil), sementara Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik masuk dalam kategori Istimewa (Sangat Berhasil). Dengan strategi yang tepat, di tahun-tahun mendatang capaian kinerja dapat lebih meningkat dan masuk dalam kategori Istimewa di semua aspek pelayanan.

Program :

- Pada tahun 2024 untuk Program Pelayanan Penanaman Modal dengan indikator Persentase Layanan Perizinan Yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan terealisasi 95,38%, dan dengan target akhir periode RPJMD /Renstra tahun 2024-2026 sebesar 82%. Sehingga capaian kinerja ini sudah terpenuhi di tahun 2024 dengan tingkat kemajuan sebesar 3,31%.
- Pada tahun 2024 untuk Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan indikator Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi yang puas dengan pelayanan perizinan terealisasi 236%, dan dengan target akhir periode RPJMD /Renstra tahun 2024-2026 sebesar 23%. Sehingga capaian kinerja ini sudah terpenuhi di tahun 2024 dengan tingkat kemajuan sebesar 895,36%.

c. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

- ❑ Target Jangka Menengah Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah sebesar 81,50 (A), dengan realisasi tahun 2024 sebesar 80,74 (A). Capaian kinerja realisasi nilai evaluasi AKIP PD sebesar 99,07% dari target jangka menengah yang telah ditetapkan dan tergolong tergolong dalam kategori "Baik (Berhasil)" karena persentase capaian kinerja lebih dari 90% dan kurang dari 110%. Namun, tingkat kemajuan mengalami sedikit penurunan sebesar -0,93% dibanding target jangka menengah. Perlu upaya lebih lanjut untuk memastikan peningkatan evaluasi agar nilai SAKIP dapat mencapai atau melebihi target di tahun mendatang, sehingga diperlukan evaluasi lebih mendalam terhadap indikator yang masih lemah dalam penilaian SAKIP serta

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

engoptimalkan penggunaan teknologi dan sistem informasi dalam pelaporan SAKIP agar lebih efisien. Dengan strategi yang tepat, di tahun berikutnya nilai SAKIP dapat lebih meningkat dan mencapai target yang diharapkan

Program :

- Pada tahun 2024 untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota dengan indikator Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur terealisasi 99,50%, dan dengan target akhir periode RPJMD /Renstra tahun 2024-2026 sebesar 100%. Sehingga capaian kinerja ini sudah terpenuhi di tahun 2024 dengan tingkat kemajuan sebesar -0,50%.

3.1.4. Perbandingan Realisasi antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional/Internasional

Untuk perbandingan realisasi investasi dengan level Nasional berdasarkan dari nilai realisasi PMA dan PMDN, sehingga dapat diketahui bahwa realisasi investasi pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang yang berasal dari PMA dan PMDN sebesar Rp. 1.551.492.847.519,- (PMA sebesar Rp. 627.321.323.611, atau sebesar 29,66% dan PMDN sebesar Rp. 924.171.523.908,-atau sebesar 43,70%).

Berikut realisasi kinerja DPMPTSP Kabupaten Jombang Tahun 2024 dibandingkan dengan Realisasi kinerja di level provinsi/nasional ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1.5
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024
dengan Realisasi Kinerja di Level Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Provinsi tahun 2024	Realisasi Nasional tahun 2024	Keterangan
Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Investasi daerah	1,551 T	147,3 T	1.714,2 T	Sumber: LKPM dan Data Realisasi Invesasi Provinsi Jawa Timur dan BKPM

a. Sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi

Realisasi investasi Kabupaten Jombang tahun 2024 sebesar 1,551 T yang berasal dari PMA sebesar 0,627 T dan PMDN sebesar 0,924 T. Realisasi Investasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Jawa Timur tahun 2024 sebesar 147,30 T, berasal dari PMA sebesar 54,90 T dan PMDN sebesar 92,40. Sedangkan Realisasi investasi Nasional tahun 2024 sebesar 1.714,20 T berasal dari PMA sebesar 900,20 T dan PMDN sebesar 814 T. Berdasarkan data di atas :

- Realisasi investasi Kabupaten Jombang berkontribusi sebesar 1,05% terhadap total investasi Jawa Timur dan 0,09% terhadap total investasi nasional.
- Kontribusi PMDN Kabupaten Jombang lebih tinggi dibandingkan kontribusi PMA.
- PMDN Jombang menyumbang 1,14% terhadap PMDN Jawa Timur dan 0,124% terhadap PMDN Nasional.
- PMA Jombang hanya menyumbang 1,05% terhadap PMA Jawa Timur dan 0,07% terhadap PMA Nasional.
- Investasi masih didominasi oleh investor dalam negeri, sementara minat investor asing masih rendah.

Faktor Pendukung Investasi di Kabupaten Jombang

- Dukungan infrastruktur yang memadai dengan adanya Jalan tol dan jalur transportasi yang baik memudahkan logistik dan distribusi.
- Potensi industri manufaktur dan pertanian, Jombang memiliki banyak industri pengolahan berbasis pertanian yang menarik investor dalam negeri.
- Kebijakan investasi oleh Pemerintah Daerah dengan penyederhanaan izin usaha dan insentif pajak bagi investor domestik.
- Ketersediaan Sumber Daya Manusia tenaga kerja lokal yang cukup banyak dan berdaya saing.
- Kedekatan dengan kota-kota Industri seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Mojokerto yang memiliki jaringan industri besar.
- Sektor Ekonomi yang mulai berkembang di sektor properti, manufaktur, dan agribisnis mulai menarik minat investor asing

Penyebab Rendahnya Kontribusi Kabupaten Jombang terhadap Investasi Jawa Timur dan Nasional

- Persaingan dengan daerah lain di Jawa Timur seperti Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo yang memiliki daya tarik lebih besar bagi investor skala besar.
- Ketergantungan terhadap investasi dalam negeri (PMDN), sementara realisasi PMA (Penanaman Modal Asing) masih perlu ditingkatkan agar bisa bersaing di tingkat nasional.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Keterbatasan investasi skala besar, sebagian besar investasi masih dalam skala menengah dan kecil, belum banyak investasi industri besar.
- Kurangnya minat Investor Asing, PMA masih relatif rendah karena kurangnya fasilitas industri berstandar global dan daya saing insentif investasi dibandingkan daerah lain.
- Birokrasi dan regulasi yang masih perlu ditingkatkan, meskipun sudah ada reformasi perizinan, beberapa investor masih menganggap proses perizinan di daerah cukup lambat dibandingkan daerah lain.
- Kurangnya promosi investasi skala besar, sehingga belum mampu menarik investor besar dengan nilai investasi yang signifikan.
- Belum optimalnya pengembangan kawasan industri dan zona ekonomi khusus, yang bisa menarik lebih banyak investor.

Tabel 3.1.6
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024
dengan Realisasi Kinerja di Level Kabupaten, Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Kabupaten tahun 2024	Realisasi Provinsi tahun 2024	Realisasi Nasional tahun 2023	Keterangan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91,08	89,83	94,46	-	Sumber data Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang
	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,25	3,69	-	-	Sumber data Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang
	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	88,44	87,88	-	-	Sumber data Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang
Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP	80,74	72,33	84,19	64,23	Sumber data Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang

a. Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

❑ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang Tahun 2024 sebesar 91,08, IKM Pemerintah Kabupaten

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

sebesar 89,83 dan IKM Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Timur sebesar 94,46. Dari data tersebut dapat diketahui :

- IKM Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang lebih tinggi 1,39% dibandingkan rata-rata IKM Pemerintah Kabupaten Jombang, Ini menunjukkan bahwa layanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang lebih memuaskan masyarakat dibandingkan layanan pemerintahan secara keseluruhan.
- IKM Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang lebih rendah 3,58% dibandingkan IKM Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Timur, Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas layanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP di tingkat provinsi masih lebih baik dibandingkan di tingkat kabupaten

❑ Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Indeks Pelayanan Publik (IPP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2024 sebesar 4,25. Sedangkan nilai IPP Pemerintah Kabupaten Jombang tahun 2024 sebesar 3,69. Dari data tersebut diketahui :

- IPP DPMPTSP Kabupaten Jombang lebih tinggi 15,16% dibandingkan rata-rata IPP Pemerintah Kabupaten Jombang.
- Ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di sektor perizinan dan investasi lebih baik dibandingkan sektor pemerintahan secara keseluruhan.
- Peningkatan IPP di DPMPTSP menunjukkan adanya inovasi layanan yang lebih maju, baik dari segi digitalisasi, kemudahan akses, maupun efisiensi dalam pemberian layanan.

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian IPP di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang antara lain:

- Digitalisasi dan Inovasi Layanan dengan Implementasi sistem perizinan online dan Mal Pelayanan Publik (MPP) memberikan akses yang lebih cepat dan mudah bagi masyarakat.
- Adanya Online Single Submission (OSS) untuk investasi dan layanan perizinan mempercepat proses pelayanan. Serta Si Rindu Nona untuk pelayanan perizinan Non Berusaha
- SDM yang Kompeten dalam memberikan kualitas layanan yang lebih baik.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Layanan DPMPTSP lebih terbuka dan transparan dengan adanya sistem tracking perizinan yang memungkinkan masyarakat memantau status layanan secara real-time.

❑ Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik

Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang tahun 2024 sebesar 88,44. Sedangkan Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupten Jombang tahun 2024 sebesar 87,88. Dari data tersebut diketahui :

- Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik DPMPTSP Kabupaten Jombang 88,44 lebih tinggi dibandingkan Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang 87,88 dengan selisih 0,56 poin.
- DPMPTSP menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih baik terhadap standar pelayanan publik dibandingkan unit layanan lainnya di Kabupaten Jombang.
- Faktor pendukung Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang tinggi meliputi penerapan SOP yang ketat, pemanfaatan teknologi, kompetensi pegawai, dan pengawasan berkala.

b. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kaupaten Jombang Tahun 2024 sebesar 80,74 (A). Nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Jombang 72,33 sedangkan nilai rata-rata Nasional Pemerintah Kabupaten/Kota 64,23. Nilai AKIP Provinsi Jawa Timur 84,19. Dari data tersebut dapat diketahui :

❑ Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang vs. Pemerintah Kabupaten Jombang

- AKIP DPMPTSP (80,74) lebih tinggi dibandingkan Pemerintah Kabupaten Jombang (72,33), selisih 11,61%.
- Hal ini menunjukkan bahwa DPMPTSP memiliki sistem perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pertanggungjawaban kinerja yang lebih baik dibandingkan unit lain di tingkat kabupaten.
- Ini juga bisa berarti bahwa DPMPTSP lebih fokus pada efisiensi dan efektivitas layanan dibandingkan unit lain di bawah Pemerintah Kabupaten Jombang.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- ❑ Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang vs. Provinsi Jawa Timur
 - Nilai AKIP DPMPTSP hanya 4,10% lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Timur.
 - Ini menunjukkan bahwa DPMPTSP Kabupaten Jombang hampir setara dengan akuntabilitas kinerja di tingkat provinsi.
 - Dengan sedikit peningkatan, DPMPTSP bisa mencapai level akuntabilitas setara dengan pemerintah provinsi.
- ❑ Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang vs. Rata-rata Nasional
 - DPMPTSP memiliki nilai AKIP jauh lebih tinggi (25,75%) dibandingkan rata-rata nasional pemerintah kabupaten/kota.
 - Ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja di DPMPTSP sudah lebih maju dibandingkan sebagian besar daerah lain di Indonesia

Faktor Pendukung nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang dapat tercapai lebih baik antara lain:

- Perencanaan Kinerja yang Lebih Baik, Dinas Penanaman Modal dan PTSP memiliki perencanaan kinerja yang lebih terukur dibandingkan unit lain di Pemkab Jombang.
- Tata Kelola dan Monitoring yang Efektif dengan evaluasi rutin secara berkala
- Kultur Kinerja yang Lebih baik dengan lebih fokus pada pencapaian target kinerja berbasis hasil dibandingkan proses administratif saja.
- SDM yang mumpuni dan berkompeten dalam menyusun laporan akuntabilitas kinerja yang sesuai standar.

3.1.5. Analisis atas Realisasi Kinerja

Beberapa penyebab keberhasilan/kegagalan dan/atau kendala /permasalahan yang dihadapi pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang dalam pencapaian kinerja di tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

a. Faktor Keberhasilan:

- Komitmen dari semua aparatur, pejabat struktural dan fungsional di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Optimalnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang;
- Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kewajiban Penyampaian LKPM oleh pelaku usaha.
- Berlakunya Peraturan Bupati Jombang Nomor 86 Tahun 2023 tentang Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang;
- Dibentuknya Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Jombang
- Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Berusaha melalui aplikasi perizinan secara online (OSS RBA dan Si Rindu Nona)
- Adanya sarana konsultasi, informasi dan pengaduan melalui surat langsung ke Perangkat Daerah, email, WA dan Kotak Pengaduan.
- Optimalisasi aplikasi GIS Potensi yang merupakan Sistem informasi geografi yang memuat potensi investasi yang ada di Kabupaten Jombang
- Pelaksanaan Business Gethering dan Pameran Investasi
- Perencanaan Kinerja yang Lebih Baik dan Implementasi program yang sesuai dengan standar akuntabilitas menjadi faktor penting dalam mencapainya.
- Penggunaan teknologi informasi yang mendukung pelaporan dan pemantauan kinerja

b. Faktor Peningkatan kinerja:

- Pendampingan dan fasilitasi kepada pelaku usaha terkait permasalahan pelaporan LKPM (Klik Join/ Klinik Jombang Investasi).
- Pembinaan dan bimbingan teknis pelaporan LKPM dengan narasumber dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Timur, OPD Teknis dan Praktisi akademisi
- Pelaksanaan Perilaku Santri (Pendampingan izin diluar kantor sehari jadi tanpa antri) yang dilaksanakan di kecamatan/kantor desa.
- Pelaksanaan sosialisasi dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko (OSS RBA)
- Evaluasi pelayanan perizinan secara berkala untuk peningkatan dan optimalisasi pelayanan perizinan
- Tata Kelola dan Monitoring yang Efektif dengan evaluasi rutin secara berkala

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Kualitas dan kapasitas SDM mempengaruhi pelaksanaan evaluasi akuntabilitas, dengan SDM aparatur yang terlatih dan berkompeten cenderung lebih mampu mencapai target akuntabilitas yang ditetapkan dalam menyusun laporan akuntabilitas kinerja yang sesuai standar
 - Komitmen Pimpinan yang tinggi terhadap akuntabilitas dan transparansi akan mendorong kinerja seluruh anggota organisasi untuk fokus pada pencapaian target evaluasi
- c. Penyebab Kegagalan/ketidaktercapaian target kinerja antara lain:
- Daya saing yang masih terbatas, Infrastruktur dan SDM yang belum berkembang pesat dibandingkan kota-kota besar lainnya di Jawa Timur.
 - Kurangnya proyek investasi baru, sehingga berkurangnya minat investor lokal maupun asing ke sektor unggulan Jombang
 - Regulasi dan birokrasi yang mungkin belum optimal jika dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki kebijakan lebih fleksibel bagi investor.
 - Tingkat pelaporan LKPM oleh pelaku usaha belum optimal karena masih terdapat pelaku usaha yang masih belum memahami tata cara penyampaian LKPM melalui OSS sehingga data realisasi investasi yang diperoleh belum maksimal.
 - Admin LKPM dari pelaku usaha/perusahaan yang sering berganti personil tanpa dibekali informasi tentang pelaporan LKPM oleh admin sebelumnya.
 - Beragam permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam memproses perizinan berusaha di OSS.
 - Pelaku usaha khususnya skala UMK yang sudah memiliki NIB tapi belum melakukan migrasi/update data usaha. .
 - Pada saat kunjungan identifikasi penyelesaian permasalahan, pelaku usaha belum mengetahui update regulasi terbaru mengenai perizinan berusaha OSS berbasis risiko.
 - Informasi potensi dan peluang investasi belum disusun secara komprehensif
 - Calon investor belum dapat mengakses informasi secara mudah, menarik dan komprehensif terkait potensi dan peluang investasi di Kabupaten Jombang terutama tentang sektor usaha yang potensial dan ketersediaan lahan sesuai peruntukannya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Kurangnya minat Investor Asing, PMA masih relatif rendah karena kurangnya fasilitas industri berstandar global dan daya saing insentif investasi dibandingkan daerah lain.
 - Belum optimalnya pengembangan kawasan industri dan zona ekonomi khusus, yang bisa menarik lebih banyak investor.
 - Kurangnya Promosi dan Branding Investasi sebagai destinasi investasi unggulan dapat menjadi kendala dalam menarik investor besar
- d. Beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi pada Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Jombang, antara lain sebagai berikut :
- Sistem online terpusat sehingga jika ada permasalahan/kendala system tidak bisa fast respon,
 - Tidak adanya helpdesk pusat di wilayah Kabupaten/Kota sehingga jika ada masalah harus melaporkan ke pusat hingga membutuhkan waktu yang lama
 - Perizinan belum terintegrasi satu pintu masih melalui banyak mekanisme atau alur yang harus dilalui,
 - Tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang rendah terkait layanan pengaduan DPMPTSP Kabupaten Jombang,
 - Kewenangan Dpmptsp yang selalu berubah secara dinamis tanpa pemberitahuan dari kementrian terkait sehingga dokumen standar pelayanan perizinan ikut berubah,
 - Rendahnya tingkat pengetahuan perusahaan tentang kewajiban pelaporan LKPM,
 - Masih adanya pelaku usaha yang tidak kooperatif terhadap kegiatan pengawasan pelaksanaan penanaman modal,
 - Kendala teknis terkait dengan instansi lain,
 - Antusiasme pelaku usaha yang rendah untuk mengikuti bimtek,
 - Masih adanya pelaku usaha yang tidak kooperatif terhadap kegiatan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
- e. Solusi dari permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut :
- Melakukan koordinasi baik dengan cara menghubungi, melalui surat dan datang langsung dengan pusat secara kontinyuitas secara berkelanjutan,

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Mendorong Pemerintah Pusat untuk membuat helpdesk di daerah agar supaya jika ada kendala bisa cepat terselesaikan,
 - Di daerah perizinan melalui banyak pintu karena sesuai tupoksi harus melalui dinas yang sesuai kewenangannya, akan tetapi dari situlah banyak proses yang dilaluinya melalui kelengkapan persyaratan hingga cek/survey ke lapangan yang tentunya memerlukan waktu. Dalam mengatasi permasalahan tersebut maka dilakukannya koordinasi secara berkelanjutan dan mendorong OPD Teknis untuk melakukan movev dengan mengundang OPD yang terkait,
 - Sosialisasi layanan pengaduan lewat media sosial, banner dll,
 - Melakukan monitoring dan evaluasi serta memperbaharui dokumen standar pelayanan sesuai kewenangan yang berlaku secara berkala,
 - Meningkatkan intensitas pelaksanaan bimtek dan sosialisasi LKPM,
 - Melakukan komunikasi lebih intensif kepada perusahaan,
 - Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait,
 - Melakukan komunikasi lebih intensif kepada perusahaan.
- f. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan pencapaian target yaitu:
- Meningkatkan kegiatan promosi/sosialisasi mengenai Potensi daerah di Kabupaten Jombang,
 - Optimalisasi dan implementasi Peraturan Daerah Pemberian insentif daerah dengan penetapan Peraturan Bupati
 - Pendampingan permasalahan perusahaan dan bimtek penyusunan LKPM
 - Meningkatkan kegiatan sosialisasi mengenai Perizinan
 - Menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan perizinan.
 - Peningkatan pelayanan perizinan melalui IT secara online (kemudahan Pelayanan Perizinan)
 - Penanganan Pengaduan yang masuk ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maupun media lainnya.
 - Penyempurnaan Standart Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perizinan
 - Penerapan SMM ISO 9001 : 2008
 - Optimalisasi pelayanan publik terutama di bidang perizinan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP)

3.2 REALISASI ANGGARAN

Selain dilihat dari pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Program dan Kegiatan Dinas Selain dilihat dari pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

3.2.1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran

Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Jombang Tahun 2024. Total Anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang Tahun 2024 setelah P APBD sebesar Rp14.843.165.411,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.14.025.396.054,- atau 94,49%.

Alokasi anggaran setiap sasaran kinerja (strategis) dan Program pada tahun 2024 ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran

Sasaran Strategis -Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	1,9 T (PMA-PMDN-IUMK)	2.114.861.515.725	111,31	3.015.602.874	2.805.109.263	93,02%
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan Iklim Pm Yang Dhasilkan	100%	100%	100	277.389.334	275.332.315	99,26%
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Tindaklanjuti Promosi Penanaman Modal	100%	100%	100	2.193.770.600	2.042.966.948	93,13%
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal	80%	275,79%	344,74	544.442.940	486.810.000	89,41%
Meningkatnya Kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89	91,08	102,34	684.098.300	670.541.236	98,02%

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sasaran Strategis -Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian
perizinan dan Non Perizinan	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,1	4,25	103,66			
	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	71	88,44	124,56			
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Layanan Perizinan Yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan	82%	95,38%	116,32	320.408.300	316.235.351	98,70%
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi yang puas dengan pelayanan perizinan	23%	236%	1026,09	363.690.000	354.305.885	97,42%
Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80,5 (A)	80,74	100,30	11.143.464.237	10.549.745.555	94,67%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	99,50%	99,5	11.143.464.237	10.549.745.555	94,67%
TOTAL					14.843.165.411	14.025.396.054	94,49%

Berdasarkan tabel 3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran diatas, maka :

*Sasaran 1 :**Meningkatnya Investasi Daerah*

- Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Investasi Daerah dengan target kinerja nilai investasi daerah sebesar Rp. 1.900.000.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 2.114.861.515.725,- atau tercapai sebesar 111,31%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.015.602.874,- dan terealisasi Rp. 2.805.109.263,- atau dengan capaian anggaran sebesar 93,02%.

Program :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan target Presentase Dokumen Potensi Dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan sebanyak 100%, terealisasi 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota terealisasi 2 dokumen dari target 2 dokumen,

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Terealisasi dokumen Updating Peta Potensi dan Peluang Investasi Kab Jombang Pendukung Web GIS potensi 2024 dan tersusun Video Profil sudah dimanfaatkan menjadi buklet leaflet. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp277.389.334,- dan terealisasi Rp275.332.315,- atau dengan capaian anggaran sebesar 99,26%.
2. Program Promosi Penanaman Modal dengan target kinerja Persentase Tindak Lanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal sebesar 100% terealisasi 82,85% sehingga capaian kinerja sebesar 82,85%., Telah terlaksana tindak lanjut pada kegiatan APKASI, GPII, Seminar PM, dan EIJF. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.193.770.600,- dan terealisasi Rp2.042.966.948,- atau dengan capaian anggaran sebesar 93,13%.
 3. Program Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dan Perizinan dengan target kinerja Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal sebesar 80% terealisasi sebesar 275,79%, sampai dengan TB IV terlaksana 262 monev pelaku usaha pada perusahaan, dari target total sejumlah 95 perusahaan di Tahun 2024, sehingga capaian kinerja nya 345%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp544.442.940,- dan terealisasi Rp486.810.000,- atau dengan capaian anggaran sebesar 89,41%.

Sasaran 2 :***Meningkatnya Kualitas pelayanan perizinan dan Non Perizinan***

- Capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dengan target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2024 sebesar 89 dan terealisasi sebesar 91,08 atau realisasi capain kinerja sebesar 102,34%. Indeks Pelayanan Publik (IPP) tahun 2024 dengan target sebesar 4,1, dan terealisasi sebesar 4,25. atau realisasi capain kinerja sebesar 103,66%. Sedangkan Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik tahun 2024 dengan target sebesar 71, dan terealisasi sebesar 88,44. Atau realisasi capain kinerja sebesar 124,56%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 684.098.300,- dan terealisasi sebesar Rp 670.541.236,- atau sebesar 98,02%.

Program :

1. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan target kinerja Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai Sop sebesar 82%, dapat terealisasi 95,38% karena Sampai dengan TB IV jumlah izin yang terbit sejumlah 30853 izin, 29429 izin terbit sesuai standart pelayanan (Izin Tepat Waktu) sehingga capaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

kinerja sebesar 116%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp320.408.300,- dan terealisasi Rp316.235.351,- atau dengan capaian anggaran sebesar 98,70%.

2. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan target kinerja 23% terealisasi sebesar 236%. Sampai dengan TB IV jumlah pengguna sistem informasi yang puas sebesar 46.140 pengguna. Pada tahun 2023 jumlah pengguna yang puas adalah 13.728 pengguna, sehingga capaian kinerja sebesar 1027% di Tahun 2024. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp363.690.000,- dan terealisasi Rp354.305.885,- atau dengan capaian anggaran sebesar 97,42%.

Sasaran 3 :***Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah***

- ☐ Capaian kinerja sasaran Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah dengan target kinerja Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah sebesar 80,5 terealisasi 80,74 (A) atau dengan capaian sebesar 100,30%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.143.464.237,- dan terealisasi Rp. 10.549.745.555,- atau dengan capaian anggaran sebesar 94,67%.

Program :

- ☐ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota dengan target kinerja Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur 100% dapat terealisasi 100% sehingga tercapai sebesar 100%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.143.464.237,- dan terealisasi Rp10.549.745.555,- atau dengan capaian anggaran sebesar 94,67%.

3.2.2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Program dan Kegiatan Dinas Selain dilihat dari pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

3.2.2.1. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan/Anggaran

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan/Anggaran dilakukan dengan menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumber daya keuangan yang digunakan. Dengan membandingkan antara prosentase capaian kinerja pada Tahun 2024 dengan prosentase penyerapan anggaran Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tersebut sudah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

mencapai efisiensi dalam penggunaan. Dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut terdapat semua program sudah mencapai efisiensi , bahkan melampaui target yang ditetapkan tahun 2024 selain beberapa program telah mencapai efisiensi melampaui target beberapa telah mencapai efisiensi walaupun tidak mengalami penambahan yang signifikan. Berikut tabel pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya Keuangan/anggaran :

Tabel 3.2.2.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan/ Anggaran

Sasaran Strategis – Program	Indikator Kinerja Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	111,31%	93,93%	84,39%
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan Iklim Pm Yang Dihasilkan	100%	99,26%	99,26%
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Tindaklanjut Promosi Penanaman Modal	100%	93,13%	93,13%
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal	344,74%	89,41%	25,94%
Meningkatnya Kualitas pelayanan perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	102,34%	98,06%	95,82%
	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	103,66%		94,60%
	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	124,56%		78,73%
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Layanan Perizinan Yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan	116,32%	98,70%	84,85%
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi yang puas dengan pelayanan perizinan	1026,09%	97,42%	9,49%
Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	100,30%	94,67%	94,39%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	99,50%	94,67%	95,15%
Total/ Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran		108,43%	94,49%	87,14%

Berdasarkan tabel 3.2.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya diatas, maka :

Sasaran 1 :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**Meningkatnya Realisasi Investasi**

- ❑ Sasaran kinerja Meningkatkan Realisasi Investasi dengan nilai prosentase capaian kinerja sebesar 111,31% dan prosentase penyerapan anggaran pendukung sasaran tersebut sebesar 93,93%. Sehingga dapat diketahui tingkat efisiensinya sebesar 84,39%. Nilai ini $\leq 100\%$, maka anggaran digunakan secara efisien. Artinya, efisiensi anggaran dalam menghasilkan capaian kinerja adalah 84,39% yang menunjukkan bahwa anggaran digunakan dengan *cukup efisien*. Semakin rendah persentase efisiensi, semakin baik pemanfaatan anggaran dalam menghasilkan kinerja yang optimal.

Program :

- ❑ Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan nilai prosentase capaian kinerja sebesar 100% dan prosentase penyerapan anggaran program tersebut sebesar 93,13%. Sehingga dapat diketahui tingkat efisiensinya sebesar 99,26%. Nilai ini $\leq 100\%$, maka anggaran digunakan secara efisien. Artinya, efisiensi anggaran dalam menghasilkan capaian kinerja adalah 99,26% yang menunjukkan bahwa anggaran digunakan dengan *cukup efisien*. Semakin rendah persentase efisiensi, semakin baik pemanfaatan anggaran dalam menghasilkan kinerja yang optimal.
- ❑ Program Promosi Penanaman Modal dengan dengan nilai prosentase capaian kinerja sebesar 100% dan prosentase penyerapan anggaran Program tersebut sebesar 93,13%. Sehingga dapat diketahui tingkat efisiensinya sebesar 93,13%. Nilai ini $\leq 100\%$, maka anggaran digunakan secara efisien. Artinya, efisiensi anggaran dalam menghasilkan capaian kinerja adalah 93,13% yang menunjukkan bahwa anggaran digunakan dengan *cukup efisien*. Semakin rendah persentase efisiensi, semakin baik pemanfaatan anggaran dalam menghasilkan kinerja yang optimal.
- ❑ Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan dengan nilai prosentase capaian kinerja sebesar 344,74% dan prosentase penyerapan anggaran pendukung Program tersebut sebesar 89,41%. Sehingga dapat diketahui tingkat efisiensinya sebesar 25,94%. Nilai ini $\leq 100\%$, maka anggaran digunakan secara efisien. Artinya, efisiensi anggaran dalam menghasilkan capaian kinerja adalah 25,94%. yang menunjukkan bahwa anggaran digunakan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

dengan *Sangat efisien*. Semakin rendah persentase efisiensi, semakin baik pemanfaatan anggaran dalam menghasilkan kinerja yang optimal.

Sasaran 2 :**Meningkatnya Kualitas pelayanan perizinan dan Non Perizinan**

- ❑ Sasaran kinerja Meningkatkan Kualitas pelayanan perizinan dan Non Perizinan dengan target kinerja nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai prosentase capaian kinerja sebesar 102,34% dan prosentase penyerapan anggaran pendukung sasaran tersebut sebesar 98,06%. Sehingga dapat diketahui tingkat efisiensinya sebesar 95,82%. Nilai ini $\leq 100\%$, maka anggaran digunakan secara efisien. Artinya, efisiensi anggaran dalam menghasilkan capaian kinerja adalah 95,82% yang menunjukkan bahwa anggaran digunakan dengan *cukup efisien*. Semakin rendah persentase efisiensi, semakin baik pemanfaatan anggaran dalam menghasilkan kinerja yang optimal.
- ❑ Indeks Pelayanan Publik (IPP) dengan nilai prosentase capaian kinerja sebesar 103,66% dan prosentase penyerapan anggaran pendukung sasaran tersebut sebesar 98,06%. Sehingga dapat diketahui tingkat efisiensinya sebesar 94,60%. Nilai ini $\leq 100\%$, maka anggaran digunakan secara efisien. Artinya, efisiensi anggaran dalam menghasilkan capaian kinerja adalah 94,60% yang menunjukkan bahwa anggaran digunakan dengan *cukup efisien*. Semakin rendah persentase efisiensi, semakin baik pemanfaatan anggaran dalam menghasilkan kinerja yang optimal.
- ❑ Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik dengan nilai prosentase capaian kinerja sebesar 124,56% dan prosentase penyerapan anggaran pendukung sasaran tersebut sebesar 98,06%. Sehingga dapat diketahui tingkat efisiensinya sebesar 78,73%. Nilai ini $\leq 100\%$, maka anggaran digunakan secara efisien. Artinya, efisiensi anggaran dalam menghasilkan capaian kinerja adalah 78,73% yang menunjukkan bahwa anggaran digunakan dengan *efisien*. Semakin rendah persentase efisiensi, semakin baik pemanfaatan anggaran dalam menghasilkan kinerja yang optimal.

Program :

- ❑ Program Pelayanan Penanaman Modal dengan dengan nilai prosentase capaian kinerja sebesar 116,32% dan prosentase penyerapan anggaran pendukung sasaran tersebut sebesar 98,70%. Sehingga dapat diketahui tingkat efisiensinya sebesar

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

84,85%. Nilai ini $\leq 100\%$, maka anggaran digunakan secara efisien. Artinya, efisiensi anggaran dalam menghasilkan capaian kinerja adalah 84,85%. yang menunjukkan bahwa anggaran digunakan dengan *efisien*. Semakin rendah persentase efisiensi, semakin baik pemanfaatan anggaran dalam menghasilkan kinerja yang optimal.

- ❑ Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan dengan nilai prosentase capaian kinerja sebesar 1026,09% dan prosentase penyerapan anggaran pendukung sasaran tersebut sebesar 97,42%. Sehingga dapat diketahui tingkat efisiensinya sebesar 9,49%. Nilai ini $\leq 100\%$, maka anggaran digunakan secara efisien. Artinya, efisiensi anggaran dalam menghasilkan capaian kinerja adalah 9,49%. yang menunjukkan bahwa anggaran digunakan dengan *Sangat efisien*. Semakin rendah persentase efisiensi, semakin baik pemanfaatan anggaran dalam menghasilkan kinerja yang optimal.

Sasaran 3 :**Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah**

- ❑ Sasaran kinerja Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah dengan target kinerja Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah dengan nilai prosentase capaian kinerja sebesar 100,30% dan prosentase penyerapan anggaran pendukung sasaran tersebut sebesar 94,67%. Sehingga dapat diketahui tingkat efisiensinya sebesar 94,39%. Nilai ini $\leq 100\%$, maka anggaran digunakan secara efisien. Artinya, efisiensi anggaran dalam menghasilkan capaian kinerja adalah 94,39% yang menunjukkan bahwa anggaran digunakan dengan cukup efisien. Semakin rendah persentase efisiensi, semakin baik pemanfaatan anggaran dalam menghasilkan kinerja yang optimal.

Program :

- ❑ Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota dengan dengan nilai prosentase capaian kinerja sebesar 99,50% dan prosentase penyerapan anggaran pendukung sasaran tersebut sebesar 94,67%. Sehingga dapat diketahui tingkat efisiensinya sebesar 95,15%. Nilai ini $\leq 100\%$, maka anggaran digunakan secara efisien. Artinya, efisiensi anggaran dalam menghasilkan capaian kinerja adalah 95,15%. yang menunjukkan bahwa anggaran digunakan dengan *Cukup efisien*.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Semakin rendah persentase efisiensi, semakin baik pemanfaatan anggaran dalam menghasilkan kinerja yang optimal.

Berdasarkan tabel dan uraian di atas dapat diketahui bahwa Rata-rata capaian kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang tahun 2024 sebesar 108,43% dengan realisasi anggaran sebesar 94,49%. Sehingga dapat diketahui tingkat efisiensinya sebesar 87,14%. Nilai ini $\leq 100\%$, maka anggaran digunakan secara efisien. Artinya, efisiensi anggaran dalam menghasilkan capaian kinerja adalah 87,14% yang menunjukkan bahwa anggaran digunakan dengan *Cukup Efisien*. Semakin rendah persentase efisiensi, semakin baik pemanfaatan anggaran dalam menghasilkan kinerja yang optimal.

3.2.2.2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia dilakukan dengan menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumber daya Manusia yang tersedia.

Berikut tabel Kebutuhan Pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang :

Tabel 3.2.3.
Daftar Kebutuhan Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Jombang

No	Nama Jabatan (Kode)	Atasan Jabatan	Jumlah Pegawai	Kebutuhan Pegawai	Selisih
1	SEKRETARIAT (21-000002)	KEPALA DINAS	1 Orang	1 Orang	0 Orang
2	Bidang Perencanaan, Pengembangan, Kerjasama dan Promosi Penanaman Modal (21-000004)	KEPALA DINAS	1 Orang	1 Orang	0 Orang
3	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan (21-000005)	KEPALA DINAS	1 Orang	1 Orang	0 Orang
4	Bidang Pengendalian dan Pengawasan (21-000006)	KEPALA DINAS	1 Orang	1 Orang	0 Orang
5	Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi (21-000007)	KEPALA DINAS	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
6	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (21-000008)	SEKRETARIAT	1 Orang	1 Orang	0 Orang
7	Sub Bagian Keuangan dan Aset (21-000009)	SEKRETARIAT	1 Orang	1 Orang	0 Orang
8	Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi (21-000010)	SEKRETARIAT	1 Orang	1 Orang	0 Orang
9	KEPALA DINAS (21-000001)		0 Orang	1 Orang	-1 Orang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Nama Jabatan (Kode)	Atasan Jabatan	Jumlah Pegawai	Kebutuhan Pegawai	Selisih
10	Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (21-000011)	Bidang Perencanaan, Pengembangan, Kerjasama dan Promosi Penanaman Modal	1 Orang	1 Orang	0 Orang
11	Seksi Kerjasama dan Promosi Penanaman Modal (21-000012)	Bidang Perencanaan, Pengembangan, Kerjasama dan Promosi Penanaman Modal	1 Orang	1 Orang	0 Orang
12	Seksi Pelayanan Perizinan Berusaha (21-000013)	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	1 Orang	1 Orang	0 Orang
13	Seksi Pelayanan Perizinan Non Berusaha (21-000014)	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	1 Orang	1 Orang	0 Orang
14	Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (21-000015)	Bidang Pengendalian dan Pengawasan	1 Orang	1 Orang	0 Orang
15	Seksi Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan (21-000016)	Bidang Pengendalian dan Pengawasan	1 Orang	1 Orang	0 Orang
16	Seksi Sistem Informasi (21-000017)	Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi	1 Orang	1 Orang	0 Orang
17	Seksi Kebijakan dan Pelaporan Layanan (21-000018)	Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi	1 Orang	1 Orang	0 Orang
18	Pramu Kebersihan (21-000024)	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
19	Pengelola Surat (21-000025)	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
20	Pengadministrasi Persuratan (21-000026)	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1 Orang	1 Orang	0 Orang
21	Pengemudi (21-000027)	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
22	Pengelola Kepegawaian (21-000028)	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
23	Pramu Taman (21-000029)	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
24	Pengadministrasi Kepegawaian (21-000030)	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1 Orang	1 Orang	0 Orang
25	Pengadministrasi Umum (21-000031)	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
26	Pengelola Dokumen Perizinan (21-000049)	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1 Orang	1 Orang	0 Orang
27	Pengadministrasi perizinan (21-000051)	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
28	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah (21-000034)	Sub Bagian Keuangan dan Aset	1 Orang	1 Orang	0 Orang
29	Pengadministrasi Pajak (21-000035)	Sub Bagian Keuangan dan Aset	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
30	Pengolah Data Pengelolaan Keuangan	Sub Bagian Keuangan dan Aset	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
31	Bendahara (21-000037)	Sub Bagian Keuangan dan Aset	2 Orang	2 Orang	0 Orang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Nama Jabatan (Kode)	Atasan Jabatan	Jumlah Pegawai	Kebutuhan Pegawai	Selisih
32	Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan (21-000038)	Sub Bagian Keuangan dan Aset	1 Orang	1 Orang	0 Orang
33	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
34	Pengelola Program dan Kegiatan (21-000033)	Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi	1 Orang	1 Orang	0 Orang
35	Pengolah Data Investasi Pemerintah (21-000042)	Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
36	Pengolah Data Kebijakan Investasi (21-000043)	Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1 Orang	1 Orang	0 Orang
37	Penyusun Rencana Promosi (21-000019)	Seksi Kerjasama dan Promosi Penanaman Modal	1 Orang	1 Orang	0 Orang
38	Penyusun Promosi dan Kerjasama (21-000020)	Seksi Kerjasama dan Promosi Penanaman Modal	1 Orang	1 Orang	0 Orang
39	Pengelola Bahan Ketatalaksanaan Pelayanan Perizinan (21-000054)	Seksi Pelayanan Perizinan Berusaha	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
40	Pengelola Dokumen Perizinan (21-000055)	Seksi Pelayanan Perizinan Berusaha	1 Orang	1 Orang	0 Orang
41	Pengadministrasi perizinan (21-000056)	Seksi Pelayanan Perizinan Berusaha	1 Orang	4 Orang	-3 Orang
42	Pengadministrasi perizinan (21-000050)	Seksi Pelayanan Perizinan	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
43	Analisis Dokumen Perizinan (21-000052)	Seksi Pelayanan Perizinan Non Berusaha	1 Orang	1 Orang	0 Orang
44	Pengelola Layanan Operasional (21-000053)	Seksi Pelayanan Perizinan Non Berusaha	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
45	Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi (21-000045)	Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1 Orang	1 Orang	0 Orang
46	Analisis Kerjasama dan Permodalan (21-000057)	Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1 Orang	1 Orang	0 Orang
47	Pengelola Data Laporan dan Pengaduan (21-000021)	Seksi Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
48	Pengelola Pengaduan Publik (21-000022)	Seksi Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan	1 Orang	1 Orang	0 Orang
49	Analisis Pengaduan Masyarakat (21-000023)	Seksi Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan	1 Orang	1 Orang	0 Orang
50	Pranata Kearsipan (21-000039)	Seksi Sistem Informasi	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
51	Pengelola Database (21-000040)	Seksi Sistem Informasi	1 Orang	1 Orang	0 Orang
52	Analisis Sistem Informasi (21-000041)	Seksi Sistem Informasi	1 Orang	1 Orang	0 Orang
53	Penyusun Laporan Kebijakan (21-000058)	Seksi Kebijakan dan Pelaporan Layanan	1 Orang	1 Orang	0 Orang
54	Pengelola Data Rekonsiliasi (21-000059)	Seksi Kebijakan dan Pelaporan Layanan	1 Orang	1 Orang	0 Orang
Jumlah			32	58	-26

Berdasarkan tabel di atas persediaan pegawai dengan kebutuhan pegawai berdasarkan ABK, ketersediaan pegawai/jumlah ASN pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun 2024 sebanyak 32 pegawai. Sedangkan Kebutuhan pegawai berdasarkan ABK sebanyak 58 pegawai, sehingga dapat diketahui terdapat kekurangan pegawai sebanyak 26 pegawai atau terakomodir sekitar 55,93%. Dengan terakomodirnya ketersediaan pegawai sekitar 55,17% sehingga dalam melaksanakan tugas perangkat daerah dapat dikatakan kurang ideal terkait ketersediaan SDM nya bila di lihat dengan capaian kinerja sebesar 108,43%. Dengan capaian kinerja sebesar 108,43% dan ketersediaan SDM sebesar 55,17% sehingga terdapat efisiensi pegawai sebesar 50,88%.

Bila dibandingkan dengan total keseluruhan pegawai (PNS 30 orang, PPPK 2 orang dan Non ASN 11 orang serta 1 orang tenaga pendamping) sebanyak 44 pegawai, maka penggunaan SDM dapat terakomodir sebesar 75,86%. Dengan adanya pegawai Non ASN dan tenaga pendamping sehingga bisa mengcover kebutuhan pegawai sebesar 20,69%. Dengan capaian kinerja sebesar 108,43% dengan ketersediaan SDM secara keseluruhan sebesar 75,86% sehingga terdapat efisiensi 69,96%.

3.2.2.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Penggunaan Sumber Daya Sarana dan prasarana dalam menunjang pencapaian kinerja perangkat daerah merupakan pendukung dalam pencapaian kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Berikut rencana kebutuhan barang milik daerah pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang pada tahun 2024 tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2.4.
Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal dan PTSP

NO	URAIAN	P-RKBMD 2024		
		PEMELIHARAAN	STANDAR KEBUTUHAN	PENGADAAN
1	A.C. Split	21	21	0
2	Alat Kantor Lainnya	3	3	0
3	Alat Khusus Keamanan Lainnya	2	2	0
4	Alat Pemadam/Portable	5	5	0
5	Alat Pemotong Kertas	1	1	0
6	Alat Penghancur Kertas	3	3	0
7	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2	2	0

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	URAIAN	P-RKBMD 2024		
		PEMELIHARAAN	STANDAR KEBUTUHAN	PENGADAAN
8	Amplifier	1	1	0
9	Audio Tape Reel Recorder	1	1	0
10	Bangku Tunggu	1	1	0
11	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	2	0
12	Bangunan Pelengkap Irigasi Lain-lain	1	1	0
13	Brandkas	1	1	0
14	Buku Umum Lain-lain	6	6	0
15	Camera Electronic	7	7	3
16	Compact Disc Player	1	1	0
17	Dispenser	1	1	1
18	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	0	0	0
19	Exhaust Fan	3	3	0
20	External	1	1	0
21	Facsimile	1	1	0
22	Filing Cabinet Besi	26	26	0
23	Filing Cabinet Kayu	1	1	0
24	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	1	0
25	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	1	0
26	Gordyin/Kray	1	1	0
27	Handy Cam	2	2	0
28	Handy Talky (HT)	6	6	0
29	Hard Disk	1	1	0
30	Hub	1	1	0
31	ILS. Calibration RX.	2	2	0
32	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Sedang	1	1	0
33	Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA	1	1	0
34	Kaca Hias	1	1	0
35	Kipas Angin	2	2	0
36	Kitchen Set	0	0	0
37	Kompas Gas (Alat Dapur)	1	1	0
38	Kursi Besi/Metal	22	22	0
39	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	12	12	0
40	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	2	0
41	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	4	0
42	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	3	3	0
43	Kursi Kerja Pejabat lainnya	3	3	0
44	Kursi Putar	8	8	0
45	Kursi Rapat	72	72	0
46	Kursi Tamu	15	15	0
47	Lap Top	12	12	0
48	Layar Film/Projector	5	5	0
49	Lemari Besi/Metal	2	2	2
50	Lemari Es	1	1	0
51	Lemari Kaca	5	5	0
52	Lemari Kayu	14	14	0
53	Lukisan Cat Air	2	2	0
54	Majalah	0	0	0
55	Meja 1/2 Biro	31	31	0
56	Meja Bundar	0	0	0
57	Meja Kerja Kayu	14	14	0
58	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1	0
59	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	3	0
60	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	1	0
61	Meja Rapat	24	24	0

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	URAIAN	P-RKBMD 2024		
		PEMELIHARAAN	STANDAR KEBUTUHAN	PENGADAAN
62	Meja Resepsionis	1	1	0
63	Meja Telepon	1	1	0
64	Mesin Absensi	2	2	0
65	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	1	1	0
66	Mesin Ketik Elektronik/Selektirik	1	1	0
67	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1	1	0
68	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2	2	0
69	Mesin Pres	1	1	0
70	Meubeleur lainnya	1	1	0
71	Microphone/Wireless MIC	1	1	0
72	Monitor	1	1	0
73	Netware Interface External	5	5	0
74	Note Book	14	14	0
75	P.C Unit	45	45	11
76	Papan Nama Instansi	1	1	0
77	Papan Visual/Papan Nama	2	2	0
78	Peralatan Komputer lainnya	1	1	0
79	Peralatan Minikomputer lainnya	1	1	0
80	Peralatan Personal Komputer lainnya	10	10	0
81	Perforator Besar	2	2	0
82	Perkakas bengkel konstruksi logam lainnya (dst)	0	0	0
83	Pick Up	1	1	0
84	Printer (Peralatan Personal Komputer)	64	64	3
85	Rak Besi	22	22	0
86	Rak Kayu	6	6	0
87	Rice Cooker (Alat Dapur)	1	1	0
88	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	16	16	1
89	Sepeda Motor	21	21	0
90	Server	2	2	0
91	Sice	1	1	0
92	Sketsel	2	2	0
93	Sofa	2	2	0
94	Sound System	5	5	0
95	Station Wagon	5	5	0
96	Stationary Generating Set	1	1	0
97	Storage Modul Disk (Peralatan Mainframe)	1	1	0
98	Tabung Gas	1	1	0
99	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	1	0
100	Tangga Aluminium	1	1	0
101	Telephone (PABX)	1	1	0
102	Telephone Hybrid	2	2	0
103	Televisi	9	9	1
104	Tempat Tidur Kayu	1	1	0
105	Transportable Generating Set	1	1	0
106	Unit Power Supply	6	6	0
107	White Board	2	2	0
107	Video Confrence Unit	0	0	1
108	Alat Jaringan Komputer	0	0	0
109	Air Purifier	0	0	0
110	Mesin Antrian	0	0	1
111	Tombol panggil antrian	0	0	12
112	Display Loker	0	0	12
113	Insight Standing Kios K Touch	0	0	1
114	Videotron	0	0	1

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	URAIAN	P-RKBMD 2024		
		PEMELIHARAAN	STANDAR KEBUTUHAN	PENGADAAN
115	Neon Box	0	0	1
116	Meja Kerja Pelayanan	0	0	15
117	Kursi Kerja Pelayanan	0	0	15
118	Kursi Hadap Pelayanan	0	0	30
119	Meja Printer	0	0	15
120	Sofa Tunggu Pelayanan	0	0	4
121	Perosotan Anak	0	0	1
122	Jungkat-Jungkit	0	0	1
123	Headset	0	0	15
124	Kursi Roda	0	0	1
125	Standing Fan	0	0	4
126	Fingerprint Scanner	0	0	2
127	Fingerprint Scanner	0	0	1
128	Iris Kamera	0	0	1
129	Alat Pemindai Tandatangan E-KTP	0	0	1
130	PRINTER KTP	0	0	1

Berdasarkan RKBMD tahun 2024 di atas, untuk kebutuhan sarana prasarana penunjang sasaran kinerja di sajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2.5.
Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Sasaran Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2024

Sasaran Strategis /Program	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	RKBMD	Realisasi	% ketercukupan sarpras	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	111,31%	4 Unit Lemari Besi/Metal (1 unit), P.C Unit (3 unit)	4 Unit Lemari Besi/Metal (1 unit), P.C Unit (3 unit)	100%	111,31%
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan Iklim Pm Yang Dihasilkan	100%	sda	sda	sda	0,00%
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Tindakan lanjut Promosi Penanaman Modal	100%	sda	sda	sda	0,00%
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal	344,74 %	sda	sda	sda	0,00%
Meningkatnya Kualitas pelayanan perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	102,34 %	146 Unit P.C Unit (6 unit), Printer (3 unit), Scanner (1 unit), Televisi (1 unit), Video Confrence Unit (1 unit), Tombol panggil antrian (12 unit), Mesin Antrian (1 unit), Display Loket (12 unit), Insight Standing Kios	146 Unit P.C Unit (6 unit), Printer (3 unit), Scanner (1 unit), Televisi (1 unit), Video Confrence Unit (1 unit), Tombol panggil antrian (12 unit), Mesin Antrian (1 unit), Display Loket (12 unit), Insight Standing Kios	100%	102,34%

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sasaran Strategis /Program	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	RKBMD	Realisasi	% ketercukupan sarpras	Tingkat Efisiensi
	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	103,66 %	K Touch (1 unit), Videotron (1 unit), Neon Box (1 unit), Meja Kerja Pelayanan (15 unit), Kursi Kerja Pelayanan (15 unit), Kursi Hadap Pelayanan (30 unit), Meja Printer (15 unit), Sofa Tunggu Pelayanan (4 unit) Perosotan Anak (1 unit), Jungkat-Jungkit (1 unit), Headset (15 unit), Kursi Roda (1 unit), Standing Fan (4 unit) Fingerprint Scanner (2 unit) Iris Kamera (1 unit), Alat Pemindai Tandatangan E-KTP (1 unit), Printer KTP (1 unit)	K Touch (1 unit), Videotron (1 unit), Neon Box (1 unit), Meja Kerja Pelayanan (15 unit), Kursi Kerja Pelayanan (15 unit), Kursi Hadap Pelayanan (30 unit), Meja Printer (15 unit), Sofa Tunggu Pelayanan (4 unit) Perosotan Anak (1 unit), Jungkat-Jungkit (1 unit), Headset (15 unit), Kursi Roda (1 unit), Standing Fan (4 unit) Fingerprint Scanner (2 unit) Iris Kamera (1 unit), Alat Pemindai Tandatangan E-KTP (1 unit), Printer KTP (1 unit)		103,66%
	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	124,56 %				124,56%
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Layanan Perizinan Yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan	116,32%	sda	sda	sda	0,00%
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi yang puas dengan pelayanan perizinan	1026,09%	sda	sda	sda	0,00%
Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	100,30 %	4 Unit Lemari Besi/Metal (1 unit), P.C Unit (2unit), Fingerprint Scanner (1unit)	4 Unit Lemari Besi/Metal (1 unit), P.C Unit (2unit), Fingerprint Scanner (1unit)	100%	100,30%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	99,50%	sda	sda	sda	0,00%
Jumlah			154 Unit	154 Unit		

Dari tabel di atas dapat dijelaskan tingkat efisiensi penggunaan sarana dan prasarana Gedung kantor pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP antara lain sebagai berikut:

- ☐ Sasaran kinerja Strategis Meningkatnya Realisasi Investasi dengan nilai prosentase capaian kinerja sebesar 111,31% dan prosentase ketercukupan sarana dan prasarana sebesar 100%. Sehingga tingkat efisiensi sebesar 111,31%. Hasil ini > 100%, berarti Sarana prasarana digunakan secara sangat efisien, menghasilkan capaian kinerja lebih tinggi dari sumber daya yang tersedia.
- ☐ Sasaran kinerja Strategis Meningkatnya Kualitas pelayanan perizinan dan Non Perizinan pada indikator Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai prosentase capaian kinerja sebesar 102,34% dan prosentase ketercukupan sarana dan prasarana sebesar 100%. Sehingga tingkat efisiensi sebesar 102,34%. Hasil ini > 100%, berarti Sarana prasarana digunakan secara sangat efisien, menghasilkan capaian kinerja lebih tinggi dari sumber daya yang tersedia.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- ❑ Pada Indeks Pelayanan Publik (IPP) dengan nilai prosentase capaian kinerja sebesar 103,66% dan prosentase ketercukupan sarana dan prasarana sebesar 100%. Sehingga tingkat efisiensi sebesar 103,66%. Hasil ini > 100%, berarti Sarana prasarana digunakan secara sangat efisien, menghasilkan capaian kinerja lebih tinggi dari sumber daya yang tersedia.
- ❑ Sedangkan pada Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik dengan nilai prosentase capaian kinerja sebesar 124,56% dan prosentase ketercukupan sarana dan prasarana sebesar 100%. Sehingga tingkat efisiensi sebesar 124,56%. Hasil ini > 100%, berarti Sarana prasarana digunakan secara sangat efisien, menghasilkan capaian kinerja lebih tinggi dari sumber daya yang tersedia.
- ❑ Sasaran kinerja Strategis Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah dengan nilai prosentase capaian kinerja sebesar 100,30% dan prosentase ketercukupan sarana dan prasarana sebesar 100%. Sehingga tingkat efisiensi sebesar 100,30%. Hasil ini > 100%, berarti Sarana prasarana digunakan secara sangat efisien, menghasilkan capaian kinerja lebih tinggi dari sumber daya yang tersedia.

3.3 UPAYA PERBAIKAN KINERJA

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah langkah-langkah yang diambil oleh organisasi dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Strategi tersebut berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi.

Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal
2. Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi
3. Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4. Peningkatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal
5. Peningkatan Pembuatan Peta Potensi investasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

6. Peningkatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal
7. Pembuatan Peta Potensi Investasi
8. Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Sedangkan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Meningkatkan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
3. Meningkatkan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
4. Meningkatkan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
5. Meningkatkan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Memetapkan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
7. Meningkatkan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah
8. Meningkatkan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha
9. Meningkatkan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal
10. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal
11. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantaua, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan pencapaian target yaitu:

- a. Meningkatkan kegiatan promosi/sosialisasi mengenai Potensi daerah di Kabupaten Jombang,
- b. Optimalisasi dan implementasi Peraturan Daerah Pemberian insetif daerah dengan penetapan Peraturan Bupati
- c. Pendampingan permasalahan perusahaan dan bimtek penyusunan LKPM
- d. Meningkatkan kegiatan sosialisasi mengenai Perizinan
- e. Menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan perizinan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- f. Peningkatan pelayanan perizinan melalui IT secara online (kemudahan Pelayanan Perizinan)
- g. Penanganan Pengaduan yang masuk ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maupun media lainnya.
- h. Penyempurnaan Standart Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perizinan
- i. Penerapan SMM ISO 9001 : 2008
- j. Optimalisasi pelayanan publik terutama di bidang perizinan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP)

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pada umumnya Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut sudah menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2024. Program / Kegiatan tersebut juga akan berbanding lurus antara pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran. Jadi diharapkan bahwa untuk mendatang agar mempertahankan capaian efisiensi dan dapat meningkatkan target kinerja ke depannya.

BAB 4 PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan pada bab-bab terdahulu dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya Realisasi Investasi dengan indikator nilai Realisasi Investasi
 - b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Pelayanan Publik (IPP), dan Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik
 - c. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator nilai Evaluasi AKIP PD
2. Target realisasi investasi tahun 2024 sebesar Rp. 1.900.000.000.000,- (PMA-PMDN-IUMK) sedangkan realisasi investasi tahun 2024 sebesar Rp. 2.114.861.515.725, berasal dari PMA sebesar Rp. 627.321.323.611,- dan PMDN sebesar Rp. 924.171.523.908,- serta IUMK sebesar Rp. 563.368.668.206,- . Ini berarti bahwa realisasi investasi tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, realisasi investasi tahun 2024 (PMA-PMDN-IUMK) telah mencapai 111,31% dari target yang ditetapkan dan tergolong dalam kategori "Istimewa (Sangat Berhasil)" karena persentase capaian kinerja lebih dari 110%.
3. Sedangkan nilai investasi di tahun 2024 berdasarkan dari PMA-PMDN yaitu sebesar Rp. 1.551.492.847.519, maka terjadi penurunan dari tahun 2023 sebesar 5,98% dan 5,02% dari tahun 2022.
4. Capaian kinerja tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 122,57%. Namun, capaian 111,31% (PMA-PMDN-IUMK) di tahun 2024 masih tergolong sangat baik dan masuk dalam kategori Istimewa (Sangat Berhasil). Sedangkan kalau hanya untuk PMA-PMDN dengan capaian sebesar 103,43%,

masuk dalam kategori Baik (Berhasil). Penurunan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti kondisi pasar global yang lebih tidak pasti atau fluktuasi ekonomi, yang mempengaruhi keputusan investasi.

5. Capaian kinerja tahun 2024 jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 yang hanya mencapai 90,75%. Sedangkan kalau berdasarkan PMA-PMDN maka capaian di tahun 2024 sebesar 103,43%. Kinerja 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan dan menggambarkan pertumbuhan positif dibandingkan tahun 2022, dan capaian ini meningkat dengan adanya investasi yang berasal dari IUMK.
6. Faktor yang menyebabkan peningkatan ini bisa jadi karena perbaikan iklim investasi, kebijakan pemerintah yang lebih mendukung, atau adanya sektor-sektor ekonomi yang lebih berkembang. Sehingga dari analisa capaian tersebut tahun 2024 menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik meskipun sedikit menurun dibandingkan tahun 2023, dan capaian ini meningkat dengan adanya investasi berasal dari IUMK, terdapat stabilitas dan pertumbuhan meskipun kondisi ekonomi global mungkin mempengaruhi sedikit lebih banyak dibandingkan tahun 2023. Sedangkan kinerja tahun 2022 menunjukkan kekurangan dalam pencapaian target, namun terdapat peningkatan yang jelas pada tahun 2023 dan 2024.
7. Realisasi investasi Kabupaten Jombang tahun 2024 sebesar 1,551 T yang berasal dari PMA sebesar 0,627 T dan PMDN sebesar 0,924 T. Realisasi Investasi Provinsi Jawa Timur tahun 2024 sebesar 147,30 T, berasal dari PMA sebesar 54,90 T dan PMDN sebesar 92,40. Sedangkan Realisasi investasi Nasional tahun 2024 sebesar 1.714,20 T berasal dari PMA sebesar 900,20 T dan PMDN sebesar 814 T. Sehingga realisasi investasi Kabupaten Jombang berkontribusi sebesar 1,05% terhadap total investasi Jawa Timur dan 0,09% terhadap total investasi nasional. Kontribusi PMDN Kabupaten Jombang lebih tinggi dibandingkan kontribusi PMA. PMDN Jombang menyumbang 1,14% terhadap PMDN Jawa Timur dan 0,124% terhadap PMDN Nasional. Sedangkan PMA Jombang hanya menyumbang 1,05% terhadap PMA Jawa Timur dan 0,07% terhadap PMA Nasional
8. Target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2024 sebesar 89, sedangkan realisasi nilai IKM tahun 2024 sebesar 91,08. Ini berarti bahwa realisasi nilai IKM tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, capaian kinerja realisasi nilai IKM tahun 2024 telah mencapai 102,34% dari target yang ditetapkan dan tergolong dalam kategori "Baik (Berhasil)" karena persentase capaian kinerja lebih dari 90% dan kurang dari 110%.

9. Di tahun 2023 ditargetkan sebesar 89,85, dan terealisasi sealisasi sebesar 89,94 dengan Capaian kinerja sebesar 100,10% berada dalam kategori Baik (Berhasil), karena berada di kisaran >90%-110%. Sedangkan target tahun 2022 sebesar 87,75, terealisasi sealisasi sebesar 85,11 dengan Capaian kinerja sebesar 96,99% berada dalam kategori Baik (Berhasil), karena berada di kisaran >90%-110%.
10. **Sehingga diketahui** pada tahun 2024, IKM melebihi target yang ditetapkan dengan capaian 91,08, sementara pada tahun 2023 hanya sedikit lebih tinggi daripada target (89,94). Capaian IKM pada tahun 2024 mengalami peningkatan signifikan (dari 85,11 ke 91,08). Meskipun tahun 2022 sempat mengalami penurunan (capaian 97%), tren keseluruhan menunjukkan perbaikan kualitas pelayanan.
11. Target Indeks Pelayanan Publik (IPP) tahun 2024 sebesar 4,1, sedangkan realisasi IPP tahun 2024 sebesar 4,25. Ini berarti bahwa realisasi IPP tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, capaian kinerja realisasi IPP tahun 2024 telah mencapai 103,66 dari target yang telah ditetapkan dan tergolong dalam kategori "Baik (Berhasil)" karena persentase capaian kinerja lebih dari 90% dan kurang dari 110%.
12. Di tahun 2023 ditargetkan sebesar 4,15 dan terealisasi sealisasi sebesar 4,43 dengan Capaian kinerja sebesar 106,75% berada dalam kategori Baik (Berhasil) karena berada di kisaran >90%-110%. Sedangkan di Tahun 2022 target IPP sebesar 4,1 dan terealisasi sealisasi sebesar 4,61 dengan Capaian kinerja sebesar 112,44% berada dalam kategori Istimewa (Sangat Berhasil) karena berada di kisaran >110%-120%.
13. Capaian IPP pada tahun 2024 (4,25) sedikit lebih tinggi daripada target yang ditetapkan (4,1), meskipun lebih rendah daripada capaian tahun 2023 (4,43). Sedangkan tahun 2024, capaian IPP (4,25) masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 (4,61), yang menunjukkan sedikit penurunan dalam kualitas pelayanan dibandingkan dua tahun sebelumnya disebabkan oleh perubahan kebijakan atau faktor eksternal seperti jumlah pengguna layanan yang meningkat tanpa diimbangi sumber daya yang cukup.
14. Target Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik tahun 2024 sebesar 71, dengan sedangkan realisasi sebesar 88,44. Ini berarti bahwa realisasi Indeks Kepatuhan Pelayanan tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, capaian kinerja realisasi Indeks Kepatuhan Pelayanan tahun 2024 telah mencapai 124,56 dari target yang telah ditetapkan dan tergolong dalam

kategori "Istimewa (Sangat Berhasil)" karena persentase capaian kinerja lebih dari 110%.

15. Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah tahun 2024 sebesar 80,5 (A), sedangkan realisasi nilai AKIP Pemerintah Perangkat Daerah tahun 2024 sebesar 80,74 (A). Ini berarti bahwa realisasi nilai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Perangkat Daerah tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, capaian kinerja realisasi nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah tahun 2024 telah mencapai 100,30 dari target yang telah ditetapkan dan tergolong tergolong dalam kategori "Baik (Berhasil)" karena persentase capaian kinerja lebih dari 90% dan kurang dari 110%.
16. Total Anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang Tahun 2024 setelah P APBD sebesar Rp14.843.165.411,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.14.025.396.054,- atau 94,49%.
17. Rata-rata capaian kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang tahun 2024 sebesar 108,43% dengan realisasi anggaran sebesar 94,49%. Sehingga dapat diketahui tingkat efisiensinya sebesar 87,14%. Nilai ini $\leq 100\%$, maka anggaran digunakan secara efisien. Artinya, efisiensi anggaran dalam menghasilkan capaian kinerja adalah 87,14% yang menunjukkan bahwa anggaran digunakan dengan *Cukup Efisien*. Semakin rendah persentase efisiensi, semakin baik pemanfaatan anggaran dalam menghasilkan kinerja yang optimal.
18. Kebutuhan pegawai berdasarkan ABK, ketersediaan pegawai/jumlah ASN pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun 2024 sebanyak 32 pegawai. Sedangkan Kebutuhan pegawai berdasarkan ABK sebanyak 58 pegawai, sehingga dapat diketahui terdapat kekurangan pegawai sebanyak 26 pegawai atau terakomodir sekitar 55,93%. Dengan terakomodirnya ketersediaan pegawai sekitar 55,17% sehingga dalam melaksanakan tugas perangkat daerah dapat dikatakan kurang ideal terkait ketersediaan SDM nya bila di lihat dengan capaian kinerja sebesar 108,43%. Dengan capaian kinerja sebesar 108,43% dan ketersediaan SDM sebesar 55,17% sehingga terdapat efisiensi pegawai sebesar 50,88%.

4.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka beberapa hal yang perlu dilakukan dalam Perencanaan Program/Kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berikutnya yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Diperlukannya penyampaian fungsi yang jelas dan tidak tumpang tindih antar SKPD teknis dalam rangka mewujudkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
2. Mengoptimalkan peran Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu satu Pintu sehingga tepat sasaran, yaitu:
 - a. Pengelolaan web perijinan, pelayanan OSS dan SiRinduNona
 - b. Memperbanyak Kajian mengenai potensi investasi dan Peta potensi guna menunjang investasi di daerah,
 - c. Meningkatkan pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap pelaku usaha sehingga diharapkan akan tertib untuk melaporkan kegiatan usahanya melalui LKPM
 - d. Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan bimtek LKPM
 - e. Melakukan maintenance dan upgrade system untuk menunjang pelayanan perizinan dan non perizinan
3. Mengintensifkan fungsi koordinasi dan konsultasi di Internal Organisasi maupun SKPD teknis terkait, sehingga proses pemberian pelayanan perizinan menjadi lebih baik sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.
4. Pengembangan system teknologi informasi pelayanan perijinan secara komprehensif dan berkelanjutan (data base).
5. Perlunya penambahan sarana dan prasarana penunjang pelayanan perizinan. Sehingga memberikan kenyamanan kepada pemohon/pengguna jasa secara bertahap, maupun sarana penunjang lainnya.
6. Perlunya penambahan kuantitas dan kualitas SDM (dengan mengikuti Bimtek untuk pelayanan perizinan OSS sesuai tupoksi dalam pemberian proses pelayanan perizinan kepada masyarakat dan pelaku dunia usaha/investor.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu saran serta kritik

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan dan perbaikan laporan LKjIP ini di masa yang akan datang.

Semoga LKjIP yang kami susun ini dapat memberikan gambaran terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang selama Tahun 2024 dan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi guna penyusunan perencanaan kinerja beserta target kinerja yang lebih baik di tahun berikutnya. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP ini, kami ucapkan banyak terima kasih.

Jombang, Januari 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JOMBANG**



Dra. WOR WINDARI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19731204 199202 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 800/90/415.01/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. WOR WINDARI, M.Si.**
Jabatan : **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.**
Jabatan : **Pj. BUPATI JOMBANG**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jombang, 18 Januari 2024
PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Ditandatangani secara elektronik



Dra. WOR WINDARI, M.Si.
NIP. 197312041992022001

PIHAK KEDUA
Pj. Bupati Jombang
Ditandatangani secara elektronik



SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JOMBANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	1.900.000.000.000
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85
		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,1
		Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	71
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP PD	80,50 (A)

NO.	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Tersedianya Kebijakan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Presentase Dokumen Potensi Dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan	100%	Rp. 277.389.334,-
2	Meningkatnya Jumlah Calon Investor PMA /PMDN yang berinvestasi	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Tindak Lanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	100%	Rp. 1.219.850.400,-
3.	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal	80%	Rp. 544.442.940,-
4	Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP	82 %	Rp. 320.410.900,-
5.	Meningkatnya Pengguna Sistem Informasi Dalam Kegiatan Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	23 %	Rp. 372.690.000,-

NO.	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
6.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	Rp. 6.853.999.187,-
TOTAL ANGGARAN					Rp. 9.588.782.761,-

Jombang, 18 Januari 2024
PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Ditandatangani secara elektronik



Dra. WOR WINDARI, M.Si.
NIP. 197312041992022001

PIHAK KEDUA
Pj. Bupati Jombang

Ditandatangani secara elektronik



SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JOMBANG
NOMOR: 100.3.7.1/585/415.01/2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. WOR WINDARI, M.Si.**
Jabatan : **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. Drs. TEGUH NARUTOMO, MM**
Jabatan : **Pj. Bupati Jombang**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jombang, 14 Oktober 2024
PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Ditandatangani secara elektronik

\${ttd1}

Dra. WOR WINDARI, M.Si.
NIP. 197312041992022001

PIHAK KEDUA
Pj. Bupati Jombang
Ditandatangani secara elektronik

\${ttd2}

Dr. Drs. TEGUH NARUTOMO, MM

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JOMBANG

NO .	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	1.900.000.000.000
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89
		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,1
		Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	71
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP PD	80,5

NO .	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Tersedianya Kebijakan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Presentase Dokumen Potensi Dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan	100%	277.389.334
2	Meningkatnya Jumlah Calon Investor PMA /PMDN yang berinvestasi	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Tindak Lanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	100%	2.193.770.600
3.	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal	80%	544.442.940
4.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai Sop	82 %	320.408.300
5.	Meningkatnya Pengguna Sistem Informasi Dalam Kegiatan	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi	Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas	23 %	363.690.000

	Penanaman Modal	Penanaman Modal	Dengan Pelayanan Perizinan		
6.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	11.143.464.237
TOTAL ANGGARAN					14.843.165.411

Jombang, 14 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Ditandatangani secara elektronik



Dra. WOR WINDARI, M.Si.
NIP. 197312041992022001

PIHAK KEDUA

Pj. Bupati Jombang

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Drs. TEGUH NARUTOMO, MM

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

- 1

NAMA

:

Dra. WOR WINDARI, M.Si
- 2

NIP

:

19731204 199202 2 001
- 3

PANGKAT/GOL. RUANG

:

Pembina Utama Muda/ IV c
- 4

JABATAN

:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang
- 5

UNIT KERJA

:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TRIBUNAN 1		TRIBUNAN 2		TRIBUNAN 3		TRIBUNAN 4					
			RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET				
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	1	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi realisasi investasi daerah	3 kegiatan	1	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi realisasi investasi daerah	3 kegiatan	1	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi realisasi investasi daerah	3 kegiatan			
			2	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Promosi dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	3 kegiatan	2	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Promosi dan Peningkatan Penanaman Modal	3 kegiatan	2	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Promosi dan Peningkatan Penanaman	3 kegiatan			
			3	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan	3 kegiatan	3	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dan Perizinan	3 kegiatan	3	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dan Perizinan	3 kegiatan			
			4	Melakukan koordinasi dengan bidang terkait realisasi investasi	3 kegiatan	4	Melakukan koordinasi dengan bidang terkait realisasi investasi	3 kegiatan	4	Melakukan koordinasi dengan bidang terkait realisasi investasi	3 kegiatan			
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1	Melakukan pembinaan peningkatan kinerja unit pelayanan publik	3 kegiatan	1	Melakukan pembinaan peningkatan kinerja unit pelayanan publik	3 kegiatan	1	Melakukan pembinaan peningkatan kinerja unit pelayanan publik	3 kegiatan			
		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	2	Melakukan kordinasi dan evaluasi terkait Penyusunan Kebijakan teknis bidang Pelayanan Perizinan	3 kegiatan	2	Melakukan kordinasi dan evaluasi terkait Penyusunan Kebijakan teknis bidang Pelayanan Perizinan	3 kegiatan	2	Melakukan kordinasi dan evaluasi terkait Penyusunan Kebijakan teknis bidang Pelayanan Perizinan	3 kegiatan			
		Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	3	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan	3 kegiatan	3	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan	3 kegiatan	3	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan	3 kegiatan			
			4	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	3 kegiatan	4	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	3 kegiatan	4	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	3 kegiatan			
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP PD	1	Melakukan pembinaan implementasi SAKIP OPD	3 kegiatan	1	Melakukan pembinaan implementasi SAKIP OPD	3 kegiatan	1	Melakukan pembinaan implementasi SAKIP OPD	3 kegiatan			
			2	Mengevaluasi capaian kinerja OPD	3 kegiatan	2	Mengevaluasi capaian kinerja OPD	3 kegiatan	2	Mengevaluasi capaian kinerja OPD	3 kegiatan			
			3	Menetapkan Rencana Kerja OPD	1 kegiatan	3	Pemantauan dan Evaluasi capaian kinerja OPD	3 kegiatan	3	Pemantauan dan Evaluasi capaian kinerja OPD	3 kegiatan			
			4	Pemantauan dan Evaluasi capaian kinerja OPD	3 kegiatan									
			5	Menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD	1 kegiatan									
4	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Persentase Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan	1	Melakukan koordinasi dengan bidang terkait Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan	3 kegiatan	1	Melakukan koordinasi dengan bidang terkait penyusunan rumusan kebijakan pengembangan iklim PM	3 kegiatan	1	Melakukan review atas rumusan kebijakan pengembangan iklim PM	1 kegiatan			
			2	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	3 kegiatan	2	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	3 kegiatan	2	Melakukan koordinasi dengan bidang terkait tindak lanjut rumusan kebijakan pengembangan iklim PM	3 kegiatan	2		
		Persentase Tindaklanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	1	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Promosi Penanaman Modal	3 kegiatan	1	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Promosi Penanaman Modal	3 kegiatan	1	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Promosi Penanaman Modal	3 kegiatan			
			2	Melakukan koordinasi dan evaluasi terkait tindak lanjut promosi PM	3 kegiatan	2	Melakukan koordinasi dan evaluasi terkait tindak lanjut promosi PM	3 kegiatan	2	Melakukan koordinasi dan evaluasi terkait tindak lanjut promosi PM	3 kegiatan	2	Melakukan koordinasi dan evaluasi terkait tindak lanjut promosi PM	3 kegiatan
			3	Melakukan pembinaan terkait tindak lanjut promosi PM	3 kegiatan	3	Melakukan pembinaan terkait tindak lanjut promosi PM	3 kegiatan	3	Melakukan pembinaan terkait tindak lanjut promosi PM	3 kegiatan	3	Melakukan pembinaan terkait tindak lanjut promosi PM	3 kegiatan

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TRIBUNAN 1		TRIBUNAN 2		TRIBUNAN 3		TRIBUNAN 4		
			RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET	
		Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP	1	Melakukan evaluasi terkait kinerja pelayanan perizinan	3 kegiatan	1	Melakukan evaluasi terkait kinerja pelayanan perizinan	3 kegiatan	1	Melakukan evaluasi terkait kinerja pelayanan perizinan	3 kegiatan
			2	Melakukan verifikasi dan validasi terkait pelayanan perizinan OSS dan Sirindunona	3 kegiatan	2	Melakukan verifikasi dan validasi terkait pelayanan perizinan OSS dan Sirindunona	3 kegiatan	2	Melakukan verifikasi dan validasi terkait pelayanan perizinan OSS dan Sirindunona	3 kegiatan
			3	Melakukan koordinasi terkait penyusunan SOP, SPP dan ISO dan SKM	1 kegiatan	3	Melakukan koordinasi terkait penyusunan SOP, SPP dan ISO dan SKM	1 kegiatan	3	Melakukan koordinasi terkait penyusunan SOP, SPP dan ISO dan SKM	1 kegiatan
		Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	1	Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan	1 kegiatan	1	Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan	1 kegiatan	1	Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan	1 kegiatan
			2	Melakukan koordinasi terkait pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan	1 kegiatan	2	Melakukan koordinasi terkait pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan	1 kegiatan	2	Melakukan koordinasi terkait pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan	1 kegiatan
		Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal	1	Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan PM	3 kegiatan	1	Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan PM	3 kegiatan	1	Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan PM	3 kegiatan
			2	Melakukan koordinasi terkait peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan PM	3 kegiatan	2	Melakukan koordinasi terkait peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan PM	3 kegiatan	2	Melakukan koordinasi terkait peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan PM	3 kegiatan
			3	Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi perizinan berusaha dan bimtek LKPM	1 kegiatan	3	Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi perizinan berusaha dan bimtek LKPM	1 kegiatan	3	Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi perizinan berusaha dan bimtek LKPM	1 kegiatan
		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	1	Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pelaksanaan Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3 kegiatan	1	Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pelaksanaan Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3 kegiatan	1	Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pelaksanaan Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3 kegiatan
			2	Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3 kegiatan	2	Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3 kegiatan	2	Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3 kegiatan
5	Terlaksananya Direktif Pimpinan Sesuai Ekspetasi Pimpinan	Nilai RB	1	Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait Pelaksanaan RB di Perangkat Daerah	3 kegiatan	1	Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait Pelaksanaan RB di Perangkat Daerah	3 kegiatan	1	Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait Pelaksanaan RB di Perangkat Daerah	3 kegiatan
			2	Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan Pelaksanaan RB di Perangkat Daerah	3 kegiatan	2	Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan Pelaksanaan RB di Perangkat Daerah	3 kegiatan	2	Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan Pelaksanaan RB di Perangkat Daerah	3 kegiatan
		Nilai ZI	1	Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait implementasi ZI di Perangkat Daerah	3 kegiatan	1	Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait implementasi ZI di Perangkat Daerah	3 kegiatan	1	Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait implementasi ZI di Perangkat Daerah	3 kegiatan
			2	Melakukan koordinasi terkait implementasi ZI di Perangkat Daerah	3 kegiatan	2	Melakukan koordinasi terkait implementasi ZI di Perangkat Daerah	3 kegiatan	2	Melakukan koordinasi terkait implementasi ZI di Perangkat Daerah	3 kegiatan

Atasan Langsung

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang

Dra. WOR WINDARI, M.Si
NIP.19731204 199202 2 001

SUGIAT
NIP.-



2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG



Jl. Presiden KH. Abdurahman Wahid No. 151 Jombang



Telp. 0321. 873333 Fax. 0321. 851733



dpmtsp.jombangkab.go.id

bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

JOMBANG
SANTRI